

Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.

Pasang Surut Partai-Partai Islam di Jawa Barat pada Pemilu 1955-2004



**PASANG SURUT PARTAI-PARTAI ISLAM
DI JAWA BARAT PADA PEMILU 1955-2004**

Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.

CV. Sentra Publikasi Indonesia

**PASANG SURUT PARTAI-PARTAI ISLAM
DI JAWA BARAT PADA PEMILU 1955-2004**

Penulis:

Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.

ISBN: 978-623-93766-4-2

Penyunting:

Lutfi Fahrul Rizal

Desain Sampul dan Tata letak:

Widodo Dwi Ismail

Penerbit:

CV. Sentra Publikasi Indonesia

Jl. A.H. Nasution No. 35, Kel. Cipadung, Kec.
Cibiru Kota Bandung, Prov. Jawa Barat. Kode
Pos 40614 Telp. 085723885877

Cetakan pertama, Mei 2020

Hak cipta dilindungi undang- undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam
bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis
dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini, berawal dari pengamatan terhadap fenomena politik dimana sering terjadi perubahan-perubahan lembaga perwakilan politik seiring dengan perubahan rezim kekuasaan yakni mulai dari rezim Orde Lama, rezim Orde Baru sampai pada rezim Reformasi, sehingga terkesan perubahan sistem perwakilan di Indonesia tidak memiliki model atau pola yang tetap. Hal tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam melalui penelitian ini, karena ada korelasi antara peralihan rezim dan mempertahankan rezim dengan memperkuat lembaga perwakilan politik, sehingga rezim-rezim tersebut mendapat legitimasi politik yang kuat. Yang kemudian rezim tersebut jatuh hanya melalui people power.

Penelitian ini terbagi pada lima bab, yakni mulai dari bab pendahuluan, bab kajian teoritis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab kesimpulan dan saran.

Semoga penelitian ini bermanfaat dan membawa pencerahan bagi para pembaca, akademisi dan praktisi partai.

Semoga bermanfaat.

Terimakasih,

Bandung, Mei 2020

Penulis,

Dr. Fauzan Ali asyid, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Teori Partai Politik	6
2.2. Teori Elit	8
2.3. Teori Perilaku Politik	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	32
3.2. Sumber Data	35
3.3. Teknik Pengumpulan Data	35
3.4.. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4. 1.Kondisi Umum	38
4.2. Hasil penelitian dan penemuannya	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	111
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang banyak dianut masyarakat Jawa Barat (Sunda). Hal ini terbukti dari jumlah penduduk 38.175.571 jiwa yang beragama Islam sebesar 34.884.290 orang. Yang beragama Kristen 637.560 orang, beragama Hindu sebesar 280.470 orang dan yang beragama Budha 109.104 orang. Jumlah tempat peribadatan pada tahun 2002 tercatat antara lain, tempat peribadatan umat Islam 157.548 buah yang terdiri dari 43.041 buah mesjid, 90.075 buah langgar dan 24.432 mushollah. Tempat peribadatan agama lainnya berjumlah 1.703 buah yang terdiri dari gereja Protestan 1.317 (77,33 persen), gereja Katholik 201 (11,80 persen), pura Hindu 21 (1,23 persen) dan vihara Budha 164 (9,64 persen).

Orang Sunda mengaku bahwa agama yang dianut dari leluhurnya adalah agama Islam tetapi hal ini masih dalam perdebatan. Hal ini menurut pengakuan dan kepercayaan orang Kanekes atau orang Baduy yang merupakan orang Sunda asli. Mereka berada di pedalaman

Serang Banten. Orang kanekes mempercayai bahwa leluhur mereka mempunyai hubungan langsung dengan Adam dan Hawa yang dalam agama Islam sebagai Manusia dan Nabi pertama. Agama yang mereka anut disebut Sunda Wiwitan.¹

Oleh karena itu, eksistensi Islam dalam pembangunan sosial-politik bangsa khususnya di Jawa Barat tidak dapat dianggap sepele sebagaimana dikatakan peneliti senior LIPI, Taufik Abdullah bahwa peranan Islam dalam sejarah masyarakat-masyarakat di Indonesia sejak abad ke-15-terutama sejak abad ke-17 dan seterusnya –sangat besar. Islam merupakan kekuatan historis yang cukup besar dalam dinamika sejarah.² Peneliti dan sejarawan lain Onghokhan menambahkan, “Sejak penyebaran agama Islam di Indonesia, agama memainkan peranan penting. Bahkan pada abad ke-20, Islam tetap tampil sebagai ideologi walaupun sudah bercampur dengan ideologi-ideologi lain seperti nasionalisme sekuler, komunisme dan sosialisme.

¹ Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*, hlm 72-77

² Taufiq Abdullah, *Islam di Indonesia* (Jakarta: Tinta Mas, 1974) hlm 56

Pilihan Jawa Barat menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dengan beberapa alasan antara lain: *pertama*, provinsi Jawa Barat sebagai provinsi penyangga ibu kota negara sehingga Jawa Barat lebih dekat kepada kekuasaan negara. *Kedua*, pemilih di Jawa Barat merupakan pemilih kedua terbanyak di Indonesia setelah Jawa Timur. *Ketiga*, mobilisasi masyarakat Jawa Barat banyak berkiprah di ibu kota negara (Jakarta) sehingga arus informasi lebih cepat merebak di tengah masyarakat Jawa Barat.

Di dalam penelitian ini, akan mencoba mengkaji secara mendalam Islam dalam kancah politik terutama di Jawa Barat, dengan menganalisis tinggi rendahnya dukungan umat Islam terhadap partai politik Islam di Jawa Barat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yang dipertajam dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana perkembangan partai-partai politik Islam di Jawa Barat?

2. Kekuatan-kekuatan politik apa saja yang memperkuat keberadaan partai-partai politik Islam di Jawa Barat?
3. Apa yang menyebabkan terjadi tinggi redahnya dukungan terhadap partai-partai Islam di Jawa Barat?

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud:

1. Memahami model dan pola perkembangan parai-partai politik Islam di Jawa Barat
2. Mengetahui korelasi teroritik kekuatan-kekuatan politik apa saja yang memperkuat keberadaan partai-partai politik Islam di Jawa Barat dilihat dari perspektif akademik
3. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadi tinggi redahnya dukungan terhadap partai-partai Islam di Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis perkembangan parai-partai politik Islam di Jawa Barat

2. Unruk menganalisis kekuatan-kekuatan politik apa saja yang memperkuat keberadaan partai-partai politik Islam di Jawa Barat
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadi tinggi redahnya dukungan terhadap partai-partai Islam di Jawa Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis terutama kajian-kajian yang berkaitan dengan partai politik.
- b. Selain itu kegunaan penelitian ini, diharapkan akan mampu lebih memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang teori-teori partai politik dengan melakukan memverifikasi teori.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh perkembangan partai-partai politik Islam di Jawa Barat.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua dasar teoritis yakni teori partai politik dan teori elit, deskripsi teori-teori tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

2.1. Teori Partai Politik

Partai Politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang telah tersusun dalam partai. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Klasifikasi dari sistem kepartaian dapat dilakukan melalui berbagai cara. Secara umum dibagi dalam dua jenis yaitu partai kader dan partai massa. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan jumlah anggota yang terdiri dari berbagai aliran politik dan kelompok.

Sementara partai kader lebih menekankan pada keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota- Basis sosiologi dari suatu partai politik adalah ideologi dan kepentingan. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana proses pengisian struktur suatu partai termasuk dalam hal keanggotaannya maka penting untuk dikemukakan jenis-jenis partai berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, yakni (1) partai proto; (2) partai kader (3) partai massa; (4) partai diktatorial; dan (5) partai catch-all.³

Bagaimana pola rekrutmen politik dilakukan partai politik? Ada dua cara khusus yang digunakan untuk melakukan perekrutan politik. *Pertama*, seleksi pemilihan melalui jalur ujian serta latihan. Cara lain adalah dengan metode penyortiran, penarikan undian yang digunakan di Yunani Kuno. Kemudian metode giliran atau rotasi,

³ Ichlasul Amal, *Op.Cit* hal xii

perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan.

Di negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia, di mana tradisi kepartaian belum berjalan kuat, rekrutmen politik seringkali terjadi hanya dalam satu atau beberapa kelompok tertentu dan biasanya berlangsung dengan pola-pola patronase. Pola ini merupakan bagian dari sistem penyuapan dan korupsi yang rumit yang merasuki banyak bidang kehidupan masyarakat. Namun dianggap sebagai pola yang paling mapan tetapi dapat melahirkan perekrutan politik yang tidak cocok baik secara politik maupun diukur dari kemampuannya.

2.2. Teori Elit

Orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat adalah sekelompok kecil yang sering disebut dengan elite. Lipset dan Solari menunjukkan bahwa elite adalah mereka yang menempati posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran,

politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan.⁴ Pernyataan seiring dikemukakan oleh Czudnowski bahwa elite adalah mereka yang mengatur segala sesuatunya, atau aktor-aktor kunci yang memainkan peran utama yang fungsional dan terstruktur dalam berbagai lingkup institusional, keagamaan, militer, akademis, industri, komunikasi, dan sebagainya. Field dan Higley menyederhanakannya dengan mengemukakan bahwa elite adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya.⁵

Teori elit⁶ muncul sekitar tahun 1950-an, dengan tokoh-tokohnya antara lain; Vilfredo Pareto dan Gaetano

⁴ Lipset dan Solari dalam J.W. Scoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 128.

⁵ Field dan Higley sebagaimana dikutip Dwaine Marvick, dalam Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 285.

⁶ Untuk suatu kritik tentang basis teoris studi elit lihat Robert Dahl, *Who Govern?.* Yale University Press, 1961, dan Nelson W. Polsby, *Community Power and Political Theory.* Yale University Press, 1963, dan untuk kritik secara umum lihat James Burnham, *The Marchiavellians: Defenders of Freedom,* London, Putnam & Co., 1943, James H. Meisel, *The Myth of the Rulling Class; Gaetano*

Mosca (Italia), Roberto Michels (seorang Jerman keturunan Swiss) dan Jose Ortega Y. Gasset (Spanyol)⁷. Pemikiran mereka merupakan reaksi terhadap teori Marx bahwa masyarakat yang akan timbul sesudah jatuhnya masyarakat kapitalis merupakan suatu masyarakat tanpa kelas sosial di mana tidak ada lagi kelas yang berkuasa atas kelas lain. Mereka mengemukakan bahwa dalam semua masyarakat- apakah pemerintahnya bersifat otoriter atau demokratis- di mana saja dan kapan saja, selalu terdapat suatu kelompok kecil yang berkuasa atas massa rakyat. Selalu ada unsur oligarkhi dalam kepemimpinan masyarakat. Kelompok kecil ini dinamakan “elite”. Elite yang biasanya menonjol dibidang tertentu merupakan minoritas kecil yang terorganisasi rapih dan sangat kohesif. Massa rakyat merupakan mayoritas yang tak

Mosca and the Elite, University of Michigan Press, 1948; Suzanne Keller, *Beyond the Rulling Class: Strategic Elite in Modern Society*, Random House, 1963; T.B. Bottomore, *Elite and Society*, Penguin Books, 1964.

⁷ Nama-nama buku mereka Vilfredo Pareto, *The Mind and Society*, Italia, 1916. Gaetano Mosca, *The Rulling Calss*, 1895 diterbitkan kembali di New York tahun 1939. Roberto Michels, *Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, The Free Press, 1949; Ortega Y. Gaset, *The Revolt of the Masses*, New York, Norton, 1932.

terorganisasi, apatis, dan cenderung untuk menerima kepemimpinan elite.⁸

Dalam teori elit berkeyakinan bahwa masyarakat hanya dikuasai oleh segelintir elit. Elit merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kualitas pribadi yang lebih dari yang lainnya, baik dari segi pengetahuan maupun moralitas sehingga mampu menjangkau kekuasaan. Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah.

Begitu pula menurut Mosca bahwa Dalam semua masyarakat, dari yang paling giat mengembangkan diri serta telah mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat—selalu muncul dua kelas dalam masyarakat—yaitu, kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang pertama, yang biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan

⁸ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 22

menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kelas kekuasaan. Sementara kelas yang kedua yang jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh yang pertama,

Dengan adanya dua kelas masyarakat tersebut apakah masih memungkinkan adanya sirkulasi elit? Pergantian (sirkulasi) elit menurut Pareto, “Sejarah”, katanya, “merupakan suatu pekuburan aristokrasi”. Ia juga mengemukakan tentang berbagai jenis pergantian antara elit, yaitu pergantian: (i) di antara kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri, dan (ii) di antara elit dengan penduduk lainnya.. Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan: (a) individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada, dan/atau (b) individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.

Tetapi apa sebenarnya yang menyebabkan runtuhnya elit yang memerintah, dan mendorong pergantian elit? Dalam hubungan ini Pareto mengembangkan konsep “residu”-nya. Konsep tersebut didasarkan pada perbedaan yang digambarkannya terjadi

di antara tindakan yang “logis” dan “non-logis” (lebih dari pada “rasional” dan “non-rasional”) dari individu-individu dalam kehidupan sosialnya. Yang dimaksudkan dengan “residu” sebenarnya adalah kualitas-kualitas yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang dan sementara dia menyusun suatu daftar “residu” dia mengikatkan kepentingan utamanya pada residu”kombinasi” dan residu “Keuletan bersama” dengan bantuan elit yang memerintah yang berusaha melestarikan kekuasaannya.

Residu ”kombinasi” dapat diartikan sebagai kelicikan dan residu “keuletan bersama” berarti kekerasan, menurut pengertian yang sederhana. Pareto juga telah menggambarkan ke dua elit tersebut sebagai para “spekulator” dan para”rentenir”. Perilaku mereka menunjukkan karakteristik yang mirip dengan cara yang dikedepankan Machiaveli dalam membentuk klik-klik pemerintah sebagai “rubah” dan “singa”. Terdapat dua tipe elit, yaitu mereka, yang memerintah dengan kelicikan dan yang memerintah dengan cara paksa. Di dalam usahanya untuk mengabsahkan ataupun merasionalkan penggunaan kekuasaan mereka, elit-elit ini melakukan “penyerapan” (derivation) atau menggunakan mitos-mitos

yang mereka ciptakan untuk mengelabui massa guna memeralatnya.

Pareto berkeyakinan akan pentingnya sirkulasi elit dari waktu-ke waktu. “Revolusi” tulisnya “merupakan akibat adanya akumulasi dalam masyarakat kelas atas – baik karena seretnya sirkulasi dalam kelas maupun sebab lain yang menyangkut unsur-unsur yang merosot dan tidak lagi memiliki residu yang memadai guna menjaga kekuasaan mereka, atau berkurangnya penggunaan kekerasan; sementara pada waktu yang bersamaan dalam elemen-elemen masyarakat strata bawah yang menyangkut kualitas superior mulai maju dan berkemauan untuk menggunakan kekerasan”. Jelaslah bahwa Pareto telah menegaskan pentingnya kapasitas serta kemauan pada elit yang berkuasa untuk menggunakan kekerasan.

Seperti halnya Pareto, Mosca juga percaya dengan teori pergantian elit. Karakteristik yang membedakan elit adalah “kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik”, sekali kelas yang memerintah tersebut kehilangan kecakapannya dan orang-orang di luar kelas tersebut menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa

akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru. Mosca percaya pada sejenis hukum yang mengatakan bahwa dalam elit yang berkuasa, tidak lagi mampu memberikan layanan-layanan yang diperlukan oleh massa, atau layanan yang diberikannya dianggap tidak lagi bernilai, atau muncul agama baru, atau terjadi perubahan pada kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, maka perubahan adalah sesuatu yang tidak adapat dihindari.

Mosca menekankan pentingnya apa yang disebutnya sebagai “formula politik”. Formula politik ini sama dengan “penyerapan”-nya Pareto. Dia percaya bahwa dalam setiap masyarakat, elit yang memerintah mencoba menemukan basis moral dan hukum bagi keberadaannya dalam benteng kekuasaan serta mewakilinya sebagai “konsekuensi yang perlu dan logis atas doktrin-doktrin dan kepercayaan-kepercayaan yang secara umum telah dikenal dan diterima. Formula politik mungkin tidak dapat, dan biasanya memang tidak, membentuk kebenaran absolut. Biasanya hal itu jarang berupa mitos yang masuk akal yang dapat diterima oleh masyarakat. Ia pun mengatakan, bahwa suatu masyarakat tentu membutuhkan

dan mendambakan suatu perasaan yang dalam akan pemenuhan tuntutan manusiawinya bahwa orang harus diperintah atas dasar beberapa prinsip moral dan hukum sekedar dengan paksaan fisik. Inilah faktor yang mendukung pengintegrasian lembaga-lembaga politik, rakyat dan peradaban. Oleh karenanya Mosca memahaminya sebagai suatu instrumen kohesi moral.

Dalam dekade lima puluhan dan enam puluhan timbul suatu generasi baru sarjana pendukung teori elite. Seorang di antaranya, Suzanne Keller dalam bukunya *Beyond the Ruling Class: Strategic Elites in Modern Society*, melihat bahwa dalam masyarakat modern jelas nampak tidak hanya satu dimensi kekuasaan, tetapi beberapa dimensi. Dalam setiap bidang kegiatan kemasyarakatan – baik di dalam maupun di luar pemerintahan – terdapat satu atau lebih elite khusus yang menonjol karena memiliki keahlian atau keterampilan di bidang tertentu; mereka oleh Suzanne Keller dinamakan "elite strategis". Misalnya ada elite politik, elite ekonomi, militer, dan pengetahuan, elite pendidikan, falsafat, dan agama, elite kesenian dan kesusastraan. Secara kolektif elite-elite ini dapat

dinamakan ”kelas berkuasa” (*ruling-class*) dalam masyarakat.⁹

Selain itu pendapat Suzanne Keller yang menjelaskan bahwa golongan elite berkembang disebabkan oleh empat proses sosial yang utama: (1) pertumbuhan penduduk, (2) pertumbuhan spesialisasi jabatan; (3) pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi; dan (4) perkembangan keragaman moral. Dengan berjalannya keempat proses itu, kaum elite pun menjadi semakin banyak, semakin beraneka ragam dan lebih bersifat otonom.¹⁰

Selain itu pendukung teori elite adalah C. Wright Mills dalam bukunya *The Power Elite* (1956), dia menganalisa masyarakat Amerika Serikat yang terdiri dari tiga lapisan. *Pertama*, Lapisan teratas yang merupakan elite kekuasaan terdiri dari elite politik (presiden, anggota kabinet, pejabat teras lainnya), dunia usaha (pemimpin-pemimpin perusahaan raksasa, bankir), dan militer

⁹ Suzanna Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 5-30

¹⁰ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit Perana elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm 87

(kepala-kepala staf angkatan bersenjata). Golongan atas ini, selain menguasai kebanyakan sumber kekayaan juga membuat semua keputusan dan kebijakan yang penting, termasuk yang menyangkut masalah perang dan damai. *Kedua*, lapisan tengah (*middle level of power*) yang menopang lapisan atas terdiri dari senator, anggota Kongres, pemimpin-pemimpin kelompok kepentingan, serikat buruh, partai dan sebagainya. Lapisan ini paling maksimal dapat memveto keputusan yang telah diambil oleh lapisan atas, tetapi tidak dapat memprakarsai masalah yang penting. Lapisan ini tidak mempunyai kekuasaan politik yang menentukan. *Ketiga*, lapisan terbawah yaitu rakyat jelata, massa yang melarat, apatis, tak terorganisasi dan tak berkuasa.¹¹

2.3. Teori Perilaku Politik

Teori perilaku pemilih melihat perilaku pemilih dalam sebuah pemilihan umum. Perilaku pemilih akan mempengaruhi proses dan hasil dari pemilihan umum itu sendiri, sebab pemilihan itu dilakukan untuk mendapatkan legitimasi politik dari masyarakat pemilih berkaitan dengan kepantasan seseorang menduduki jabatan politik.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hal 23-24.

Dalam pemilihan umum yang demokratis rakyat menentukan pilihannya sendiri terhadap wakil-wakilnya.

Menurut Gabriel Almond, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik, antara lain: pendidikan tinggi, status sosial-ekonomi dan keanggotaan dalam partai politik.¹² Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik, meliputi:¹³

- (a) Kelas: perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang serupa;
- (b) Kelompok/komunal: perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama
- (c) Lingkungan (*neighborhood*); perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu-sama lain
- (d) Partai; perorangan-perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
- (e) Golongan (*faction*); perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus

¹² Gabriel A. Almond, *Political Socialization and Culture and Political Participation*, dalam *Comparative Politik Today* (Boston: Little, Brown and Company, 1974).

¹³ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*, alih bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Rika Cipta, 1990), hlm. 21.

menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya, satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal-balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Studi tentang perilaku memilih selama ini telah berkembang pesat. Namun demikian dikalangan para peneliti perilaku memilih ada semacam arus utama teori tentang perilaku memilih.¹⁴ Mashab tersebut yaitu *mashab Columbia* (Pendekatan Sosiologis) dan *mashab Michigan* (Pendekatan Psikologis). Baru setelah kedua mashab tersebut berkembang beberapa dasawarsa, lalu muncul Pendekatan Rasionalis

Mashab Columbia (Pendekatan Sosiologis)

Teori Voting dari *Mashab Columbia*, yang dipelopori oleh *Columbia's University Bureau of Applied*

¹⁴ Lihat J. Kristiadi, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia* (Jakarta, Prisma LP3ES, 1996, No. 3-1996), hlm. 73-91. Lihat juga Steven Lukes, (ed). *Readings in Social and Political Theory Power* (Oxford: Blackwell, 1992). Fred Greesntein dan Nelson Polsby (eds). *Handbokk of Political Science*, Vol 3. (Reading Mass: Addison-Weslay, 1977). Jeffry M. Paige, *Political Orientation and Riot Participation*, dalam *American Sociological Review*, 1971.

Social Science pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial – usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya – memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam menentukan sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. Dalam banyak penelitian, faktor agama, aspek geografis (kedaerahan), dan faktor kelas atau status ekonomi (khususnya di negara-negara maju) memang mempunyai korelasi nyata dengan perilaku pemilih. Hal ini didasari pemikiran bahwa subkultur tertentu memiliki *kognisi sosial* tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku tertentu. *Kognisi* yang sama antar anggota subkultur terjadi karena sepanjang hidup mereka dipengaruhi lingkungan fisik dan sosio-kultural yang relatif sama. Mereka dipengaruhi oleh kelompok-kelompok referensi yang sama. Karena itu, mereka memiliki kepercayaan, nilai, dan harapan yang juga relatif sama, termasuk dalam kaitannya dengan preferensi pilihan politik. Dengan pendekatan ini, para anggota subkultur yang sama

cenderung mempunyai preferensi politik yang sama pula.¹⁵ Menurut Dennis Kavanagh menjelaskan bahwa pendekatan ini pada hakekatnya menjelaskan, bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh signifikan dalam menentukan perilaku pemilih.¹⁶

Dari uraian di atas jelasnya tingkah laku politik seseorang sangat dipengaruhi oleh keanggotaan mereka dalam kelompok sosial serta norma-norma yang dianut oleh kelompok sosial tersebut. Dengan demikian norma kelompok menentukan norma dan tingkah laku individu.¹⁷

¹⁵ Lihat H.A. Bone & A. Ranney, *Politics and Voters* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1981) seperti yang dikutip Adnan Nursal dalam *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 56-58.

¹⁶ Dennis Kavanagh, *Political Science and Political behavior* (London: George Allen & Unwin, 1980), hal 84., lihat juga Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).

¹⁷ Lihat Riswanda Imawan, *Dinamika Pemilih dalam Pemilu 1992*, Makalah, disampaikan pada pertemuan CSIS di Jakarta, 9 Juli 1993. Lihat juga Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Social Behavior* (London: George and Unwin, 1983), hlm. 83-87. Contoh hasil penelitian yang pernah dilakukan di AS dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural menunjukkan bahwa pilihan terhadap suatu partai yang dilakukan oleh seorang anak cenderung mengikuti pilihan orang tua mereka. Orang-orang yang tergolong dalam WASPs (*white-Anglo-Saxon-Protestan*) yang

Di Indonesia telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang menjelaskan pengaruh faktor sosiologis terhadap perilaku politik masyarakat dari berbagai aspek, sebab di Indonesia pada realitasnya terdapat pluralisme politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Burhan D Magenda yakni Pluralisme itu terbentuk dari berbagai macam “kebudayaan politik” lokal. Sebagai akibat dari pluralisme vertikal dan horizontal ini, maka terjadi pembelahan-pembelahan yang tajam dan sangat sukar dipertemukan. Pembelahan-pembelahan ini misalnya antara kaum santri Islam versus non-Islam, khususnya kaum abangan Jawa. Ada pula pembelahan antara penganut Islam versus agama-agama lain. Ada pula pembelahan antara Jawa dengan bukan

umumnya memiliki status sosial ekonomi tinggi cenderung memilih Republik, dan orang-orang yang status sosialnya rendah, khususnya orang Katolik, orang Negro, orang keturunan Polandia, Irlandia dan Italia, yang mempunyai derajat rendah cenderung memilih Demokrat. Laki-laki lebih partisipatif dibanding wanitanya, karena adanya pandangan khususnya di tingkat masyarakat yang status sosialnya rendah bahwa tepatnya wanita adalah mengurus rumah mereka, masalah politik adalah dunia laki-laki. Sedangkan wanita-wanita yang berpendidikan tinggi, mereka menganggap bahwa urusan-urusan politik adalah urusan mereka juga. Lihat Austin Runney, *Sociology of Voting*, dalam *Politics and Voters*, ed. Hugh A. Bone and Austin Runney (New York: McGraw Hill Book Company, 1981), hlm. 17-31.

Jawa, antara penduduk asli versus penduduk keturunan Tionghoa, antara Pusat dengan Daerah, antara priyayi dan Bangsawan dengan orang biasa. Pembelahan-pembelahan ini membuat “kebudayaan politik” Indonesia sangat plural sifatnya dan harus merekonsiliasikan berbagai aliran, ideologi, suku, dan agama yang seringkali tidak hanya berbeda, tapi bahkan bertentangan satu sama lain.¹⁸

Salah satu peneliti yang terkemuka yaitu Geertz dalam studinya tentang orientasi *sosio-religius* masyarakat Jawa. Ia membagi masyarakat Jawa atas tiga kelompok/aliran, yakni abangan, santri dan priyayi. Ia menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Jawa adalah abangan. Kelompok abangan cenderung memilih partai berbasis *ideologi nasionalis-sekuler*, sedangkan kelompok santri cenderung ke partai Islam.¹⁹ Tipologi ini terjustifikasi ketika Herberth Feith melakukan analisis terhadap hasil pemilu 1955 di mana perspektif aliran ternyata masih mampu menjelaskan pola afiliasi dan perilaku politik pada masa itu, yang tercermin dari

¹⁸ Burhan D Magenda dalam Ismid Hadad, *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 29-3

¹⁹ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (London: The Free Press, 1960).

kemenangan PNI dan PKI yang berbasis *nasionalis-sekuler*.²⁰

Analisis Geertz walaupun telah banyak dikritik tetapi masih sering dirujuk ketika menganalisa politik Indonesia. Yang penting dari uraian di atas adalah bahwa perilaku politik masyarakat Indonesia, ternyata untuk sebahagian masih dipengaruhi faktor-faktor *sosiologis-kultural*. Hal ini ditegaskan pula oleh Riswanda Imawan yang menyatakan bahwa norma kelompok menentukan norma dan tingkah laku individu.²¹ Pendekatan ini, menurut Dennis Kavanagh, *links the individual with the social structure, placing the vote in a social context*.²²

Dengan kata lain, perilaku politik seseorang diasumsikan sebagai lampiran belaka dari asal-usul sosial seseorang. Kecenderungan inilah yang membuat David Denver menamakan paradigma ini sebagai pendekatan determinisme sosial (*social determinism approach*).²³

Mashab Michigan (Pendekatan Psikologis)

²⁰ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1999)

²¹ Riswanda Imawan, *Op. Cit.*

²² Dennis Kavanagh, *Op. Cit.*

²³ Denver dalam Mohammad Asfar, *Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Politik*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* 16 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 48

Mashab Michigan menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi. Menurut Greenstein, seperti dikutip Asfar,²⁴ sikap memiliki tiga fungsi. *Pertama* fungsi kepentingan, bahwa penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, fungsi penyesuaian diri, bahwa seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, bahwa upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi.

Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini, seorang calon pemilih telah menerima "pengaruh" politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari

²⁴ Asfar, M. *Ibid.*

pandangan politik yang diekspresikan orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian, dan sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan seperti inilah yang disebut sebagai identifikasi partai. Denver menegaskan bahwa pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas (identifikasi partai) yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi) sepanjang hidup.²⁵ Dengan demikian kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah inti dari mashab psikologis untuk menjelaskan perilaku seseorang dalam pemilu.²⁶

Pendekatan Rasional

Pada Kenyataannya, sebagai pemilih mengubah pilihan politiknya dari suatu pemilu ke pemilu lainnya. Peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Komunikasi politik, dengan substansi dan strategi yang tepat mungkin saja

²⁵ Denver dalam Muhammad Asfar, *Ibid.*, hlm 50

²⁶ Adnan Nursal, *Op.Cit*, hlm. 59.

mempengaruhi pilihan seseorang. Perubahan ini, meskipun harus melalui usaha yang keras, bukanlah hal yang mustahil. Dengan kata lain, perilaku pemilih bukan hanya ditentukan oleh faktor karakteristik sosial dan identifikasi partai.

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice approach*) mengandalkan adanya analogi antara pasar (ekonomi) dengan perilaku pemilih (politik). Hugh Ward dalam tulisannya yang berjudul *Rational Choice Theory* menyatakan bahwa *the mainstream varian of rational choice assumes that individuals all have the rational capacity, time and emotional detachment necessary to choose a best course of action, no matter how complex the choice.*²⁷ Pendekatan di atas tidak berbeda jauh dengan Asfar ketika mengelaborasi pendekatan ini. Ia menyatakan bahwa:

Apabila secara ekonomi anggota masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka perilaku politik anggota masyarakat pun akan dapat bertindak rasional pula,

²⁷ Hugh Ward, *Rational Choice Theory*, dalam David Marsh dan Gerry Stoker, *Theory and Methods in Political Science* (Ed) (New York: ST Martin Press INC), hlm 79

yakni memberi suara ke OPP yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan dan kemashlahatan dan menekan kerugian atau kemudharatan yang sedikit mungkin. Secara demikian, perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan (*maximum gained*) atau yang mendapatkan kerugian yang paling sedikit; tetapi juga dalam arti memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil (*least risk*), yang penting mendahulukan selamat.²⁸

pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah – dari partai yang berkuasa kelak – dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa memperdulikan label partai.²⁹

Ketertarikan para pemilih terhadap isu-isu tertentu dan kandidat tertentu yang ditawarkan oleh partai politik

²⁸ Mohammad Asfar, *Op.Cit*, hlm. 52.

²⁹ *Ibid*, hlm. 62-64

bersifat situasional. Dengan sendirinya, daya tarik isu dan kandidat tersebut tidaklah selalu permanen, melainkan berubah-ubah. Pengaruh isu dan kandidat itu antara lain berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilu bersangkutan terutama peristiwa dramatis. Sementara itu, pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi, dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, kesenian, olah raga, dan politik.

Dampak peristiwa tertentu, pengaruh isu-isu, dan kandidat yang ditawarkan terhadap perubahan situasional perilaku pemilih membuat beberapa pakar melirik model perilaku konsumen produk bisnis sebagai salah satu pendekatan untuk memahami perilaku pemilih. Bahwa perilaku pemilih, menurut Him Melweit, merupakan pengambilan keputusan cepat dan bahwa pengambilan keputusan itu tergantung pada situasi sosial-politik tertentu yang tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lainnya.

Pendekatan rasional mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para

pemilih melakukan ”penilaian” yang valid terhadap tawaran partai/kandidat. Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan dan kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis.³⁰

Adapun ciri-ciri pemberi suara rasional itu meliputi lima. *Pertama*, dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif. *Kedua*, dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain. *Ketiga*, menyusun alternatif dengan cara transitif: jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C. *Keempat*, memilih alternatif yang tingkat prestasinya lebih tinggi. *Kelima*, selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif yang sama.

³⁰ *Ibid*, hlm. 64-69.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Albert Wijaya dan Noeng Muhajir³¹ bahwa penelitian kualitatif dimaksud adalah penelitian dengan mengandalkan konstruksi logika dan penggalian interpretatif berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi atau bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah studi ini. Pendekatan penelitian kualitatif umumnya meletakkan peneliti pada pandangan fenomenologis di mana peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan keterkaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu.³²

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi

³¹ Albert Wijaya dan Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990) hlm. 66

³² Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) hlm 9

yang alami. Bogdan dan Taylor³³ mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam kaitan itu digunakan juga studi kasus sebagai *research strategy*, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Nazir³⁴ bahwa studi kasus adalah penelitian yang berkenaan dengan suatu periode tertentu atau khas dari keseluruhan personalitas. Umumnya peneliti ingin mempelajari latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit yang menjadi subjek. Menurut Denzin Guba studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus.³⁵

Penelitian studi kasus dimaksud dengan dengan format deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri yang demikian

³³ Lexi Moleong, *Ibid.*, hlm. 3

³⁴ Mon. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm 66

³⁵ Agus salim (Penyunting0, *Teori dan Paradigma sosial dari Denzin Guba dan penerapannya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001) hlm 43

memungkinkan studi ini dapat amat mendalam dan demikian bahwa kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini, Karena itu, penelitian ini bersifat mendalam dan “menusuk” sasaran penelitian. Tentunya untuk mencapai maksud ini penelitian membutuhkan waktu yang relatif memakan waktu.

Pada cirinya yang lain, deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis pada penelitian berikutnya atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Sehingga penelitian ini tidak bertujuan menguji suatu hipotesis tetapi justru membuat sebuah hipotesis baru bagi penelitian yang berikutnya sehingga nantinya dapat membuat sebuah teori.

Dengan demikian, format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan dukungan masyarakat kepada suatu kelompok, permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk, masalah masalah efek media terhadap pandangan pemirsa terhadap suatu tayangan media, permasalahan

implementasi kebijakan publik di masyarakat dan sebagainya.

3.2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data data primer dan data sekunder.

(1) Data primer, yakni data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi pemilu dari kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya KPU Jawa Barat.

(2) Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi dan media cetak, seperti surat kabar, majalah, risalah-risalah rapat, surat keputusan dan lain-lain.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan teknik dokumentasi: yaitu sebuah metode yang menelusuri data historis berkaitan dengan dokumen-dokumen yang pernah ada terkait dengan penelitian yang ada. (Bungin, 2010 : 109). Biasanya berupa Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia

adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

3.4. Teknik Analisa Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan melalui multi level analisis (*multi level analysis*) dan analisis historis-holistik. Hal ini didasarkan atas tiga pertimbangan utama. *Pertama*, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan gejala yang kompleks. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁶

³⁶ Lexy j. Moleong, *Op.Cit.* hlm 4

Analisis terhadap data kualitatif merupakan sumber data yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Penggunaan data kualitatif diharapkan dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.³⁷

³⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992) hlm. 1-2. Lihat juga uraian secara rinci dan jelas tentang berbagai paradigma ilmu pengetahuan, pendekatan penelitian dan perbandingan model analisis kualitatif dan kuantitatif dalam Dedy Nur Hidayat, *Metode Penelitian Kualitatif* (kumpulan Bahan kuliah), (Jakarta: PPS UI, 2003).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum

4.1.1. Profil Wilayah Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jawa Barat diidentikkan dengan etnis Sunda. Posisi wilayahnya sangat strategis, yakni sebagai penyangga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hampir seluruh wilayah Ibu kota Negara di kelilingi dan berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Barat. Bandung yang menjadi Ibu kota Provinsi Jawa Barat dan juga pusat kebudayaan Sunda terletak hampir di tengah-tengah wilayah Jawa Barat. Posisi wilayahnya yang sangat strategis menyebabkan Provinsi Jawa Barat senantiasa menjadi tempat pelaksanaan berbagai kegiatan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak di antara $5^{\circ}50' - 7^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}48' - 108^{\circ}48'$ Bujur Timur. Wilayah Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah Timur, Laut Jawa dan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta di sebelah Utara, Selat

Sunda di sebelah Barat dan Samudra Hindia di sebelah Selatan. Sungai Cilosari dan Sungai Citanduy merupakan batas alam antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Tampak sekali wilayah Jawa Barat dikelilingi laut kecuali di bagian Timur. Memang wilayah ini merupakan bagian Pulau Jawa yang bentuknya memanjang arah barat-timur dengan panjang pulau sekitar 1.000 km. Jawa Barat sendiri panjangnya 265 km dan lebarnya antara 150-175 km. Jika dibandingkan, maka luas Jawa Barat sekitar 2,46% dari luas seluruh wilayah Indonesia atau 27% dari luas Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau kelima terbesar daripada pulau-pulau di Kepulauan Nusantara setelah Irian, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Pulau Jawa berada pada posisi bagian Selatan Kepulauan Nusantara dilihat dari arah utara-selatan dan di bagian tengah dilihat dari arah barat-timur.

Kondisi geografis Jawa Barat yang memiliki lahan yang subur yang berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanahnya digunakan untuk pertanian. Hal ini menyebabkan Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai

lumbung pangan nasional. Jawa Barat yang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 188.63 mm.

Secara ekonomis, Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. PDRB Jawa Barat pada tahun 2002 atas dasar harga berlaku mencapai 214 konstan yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga dan inflasi mencapai 59.713 milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka masing-masing sebesar 10,94 persen dan 3,27 persen. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2002 sebesar 56 persen. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 49,67 persen.

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah seluas 3.710.035 km² yang terbagi dalam 16 kabupaten dan 9 kota, mencakup sekitar 535 kecamatan, 1724 kelurahan dan 3.939 desa. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jawa Barat pada tahun 2002 sebanyak 500.228 orang. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 38.175.571 jiwa. Untuk mendapat gambaran lebih jelas dapat di lihat tabel 4 berikut.

Tabel
Nama Kabupaten/Kota, luas wilayah, Jumlah
penduduk, dan jumlah pemilih pada Pemilu 2004³⁸

NO	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih
1	Kab. Bogor	3.065,52	3.896.054	2.483.394
2	Kab. Sukabumi	3.867,16	2.170.582	1.422.558
3	Kab. Cianjur	3.460,82	2.048.495	1.343.133
4	Kab. Bandung	2.954,02	4.020.002	2.696.854
5	Kab. Garut	3.045,33	2.206.750	1.413.680
6	Kab. Tasikmalaya	2.740,33	1.589.786	1.087.044
7	Kab. Ciamis	2.520,54	1.521.094	1.082.860
8	Kab. Kuningan	1.117,00	1.036.166	737.506
9	Kab. Cirebon	974,00	2.040.895	1.351.221
10	Kab. Majalengka	1.210,00	1.165.853	823.457
11	Kab. Sumedang	1.421,82	1.022.766	723.832
12	Kab. Indramayu	1.935,27	1.653.366	1.137.365

³⁸ Sumber dari Monografi Jawa Barat tahun 2002 dan tentang pemilih dari KPU Jawa Barat

13	Kab. Subang	1.863,00	1.376.050	971.865
14	Kab. Purwakarta	971,72	748.790	500.365
15	Kab. Karawang	1.578,45	1.902.567	1.301.797
16	Kab. Bekasi	1.082,68	1.869.585	1.250.628
17	Kota Bogor	112,74	804.549	564.912
19	Kota Sukabumi	48,44	269.142	185.602
20	Kota Bandung	168,06	2.193.268	1.620.217
21	Kota Cirebon	37,36	276.463	191.357
22	Kota Bekasi	201,55	1.821.909	1.350.026
23	Kota Depok	212,24	1.335.237	932.504
24	Kota Cimahi	4.440,50	472.705	341.050
25	Kota Tasikmalaya	18.578,70	570.725	390.872
26	Kota Banjar	13.382,10	162.772	112.876
JUMLAH		3.710.035,00	38.175.571	26.016.975

Tabel 4 menunjukkan bahwa luas wilayah Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2003 adalah 3.710.035 Km². Luas wilayah tersebut terbagi dalam 25 wilayah kabupaten/kota. Kabupaten yang paling luas wilayahnya adalah Kabupaten Sukabumi yakni 3.867,16 km²,

Kabupaten Cianjur seluas 3.460,82 km², Kabupaten Bogor seluas 3.065,52 km² dan Kabupaten Garut seluas 3.045,33 km². Sedangkan daerah yang wilayahnya paling sempit adalah Kota Cirebon yang luasnya hanya 37,36 km², Kota Sukabumi seluas 48,44 km² dan Kota Bogor yang luasnya 112,74 km².

Dilihat dari jumlah penduduk, tabel 4 menunjukkan bahwa sampai tahun 2003, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 38.175.571 jiwa dengan jumlah pemilih pada pemilu 2004 sebesar 26.016.975 jiwa. Wilayah paling padat jumlah penduduknya adalah Kabupaten Bandung, yakni 4.020.002 jiwa, kemudian Kabupaten Bogor sebesar 3.896.054 jiwa dan Kabupaten Garut sebesar 2.206.750 jiwa. Daerah yang kepadatannya sangat rendah adalah Kabupaten Sukabumi yang jumlah penduduknya hanya sebesar 2.126.404 jiwa, kemudian Kabupaten Cianjur sebesar 1.993.727 jiwa dan Kabupaten Subang sebesar 1.352.354 jiwa. Jumlah rumah tangga pada tahun 2002 di Jawa Barat mencapai 10.104.044 rumah tangga tertinggi berada di wilayah Kabupaten Bandung yaitu 1.172.020 rumah tangga disusul Kabupaten Bogor sebesar 695.365 rumah tangga dan

ketiga terbesar adalah Kota Bandung sebesar 611.240 rumah tangga.³⁹

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki luas dan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda. Terdapat kabupaten/kota yang wilayahnya luas tetapi kepadatan jumlah penduduknya rendah misalnya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Terdapat pula kota yang sempit wilayahnya tetapi kepadatan jumlah penduduknya tinggi seperti, Kabupaten Bandung yang memiliki jumlah penduduk sebesar 4.020.002 jiwa, Kota Bandung sebesar 2.193.268, Kota Bekasi sebesar 1.821.909 jiwa dan Kabupaten Cirebon yang memiliki jumlah penduduk sebesar 2.040.895 jiwa.⁴⁰

Kondisi itu menunjukkan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Barat tidak terjadi penyebaran penduduk yang merata di setiap kabupaten/kota. Wilayah kota besar seperti Bandung, Bogor, Depok dan Bekasi lebih padat jumlah penduduknya. Begitu pula kabupaten/kota industri

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

seperti Kabupaten Bandung, Karawang dan Kabupaten Cirebon memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang berpotensi pertanian seperti Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat lebih memilih wilayah yang secara ekonomis lebih terbuka untuk mencari lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hal yang beralasan kalau pemerintah wilayah kabupaten/kota besar dan kabupaten/kota industri senantiasa diperhadapkan pada masalah urbanisasi besar-besaran dan menuntut perluasan wilayah perkotaan. Di tahun 2002 kepadatan penduduk Jawa Barat mencapai 3.012 orang perkilometer persegi. Kota Bandung masih merupakan daerah terpadat yaitu sebesar 12.762 orang perkilometer persegi. Sedangkan yang terendah Kabupaten Cianjur hanya sebesar 629 orang perkilometer persegi.

Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi penyangga Ibukota Negara senantiasa dihadapkan pada tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari provinsi-provinsi lain baik bertujuan untuk bekerja maupun untuk bersekolah di perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat atau

di Jakarta dengan mengambil tempat tinggal di Jawa Barat seperti di Bandung, Bogor, Depok dan Bekasi.

Penyebaran penduduk yang tidak merata di Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2004 sebagaimana tertulis dalam tabel 4 di atas. Masyarakat pemilih terbesar terdapat di Kabupaten Bandung yang merupakan kabupaten terbesar jumlah penduduknya dengan jumlah pemilih sebesar 2.696.854 pemilih. Disusul Kabupaten Bogor sebesar 2.483.394 pemilih, Kota Bandung jumlah pemilih sebesar 1.620.217 pemilih dan Kabupaten Cirebon sebesar 1.351.221 pemilih. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah pemilih terkecil adalah Kota Banjar sebesar 112.876 pemilih, Kota Cirebon sebesar 191.357 pemilih dan Kota Sukabumi sebesar 185.602 pemilih.⁴¹

⁴¹ *Ibid*

4.1.2. Elit Tradisional (Menak) Dalam Konstalasi Politik di Jawa Barat

Menak merupakan kedudukan tinggi stratifikasi sosial di Jawa Barat. Menak identik dengan elit.⁴² Dalam masyarakat Sunda terdapat tiga (3) stratifikasi sosial yaitu

⁴² Pengertian Menak lihat Nina Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942* (Bandung, Pusat Studi Kebudayaan Sunda, 1998) hlm1-18 yang antara lain mengambil pengertian dari Van Vollenhoven seorang ahli Hukum Adat menjelaskan bahwa sebutan menak yang pernah dipergunakan dalam tradisi Jawa, di daerah Sunda dipergunakan untuk menyebut semua orang yang sangat dihormati baik para bangsawan maupun para pejabat tinggi. Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa ada golongan bangsawan rendah (*klenen adel*) yang disebut Santana yang antara lain digelari asep, ujang, dan agus. Golongan bangsawan dan Santana ini adalah keturunan raja-raja terdahulu atau keturunan raja-raja kemudian di wilayah Sunda. Di samping itu, istilah menak, Santana dan cacah dapat ditemukan juga dalam daftar kata yang dimuat dalam buku *Adatrecht bundel* (Panitia Hukum Adat yang diketuai Snouck Hurgronje. Dalam daftar kata itu disebutkan bahwa menak dapat diartikan sebagai: a. golongan masyarakat tertinggi; b. golongan bangsawan tinggi yang berhak atas title raden; c. golongan yang tertinggi pangkatnya; d. golongan penguasa. Golongan Santana adalah golongan bangsawan kecil yang merupakan keturunan dari perkawinan antara seorang raden dengan golongan yang lebih rendah. Gelar golongan ini dapat dibedakan antara asep, mas, dan ujang. Golongan Santana berada di antara golongan menak dan golongan cacah (cacah kuricah) atau somah (rakyat kecil). Menurut Zoetmoelder, kata menak berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya “bangsawan”.

menak, Santana dan cacah. Istilah menak untuk menyebut semua orang yang sangat dihormati baik para bangsawan maupun para pejabat tinggi. Nama yang biasa dipakai kaum menak antara lain raden, ningrat, kusumah, prawira, suria, dan nagara. Selain itu ada golongan bangsawan rendah yang disebut Santana yang antara lain digelar asep, ujang, dan agus. Golongan Santana adalah golongan bangsawan kecil yang merupakan keturunan dari perkawinan antara seorang raden dengan golongan yang lebih rendah. Golongan bangsawan dan Santana ini adalah keturunan raja-raja terdahulu atau keturunan raja-raja kemudian di wilayah Sunda. Selain itu adalah golongan cacah atau somah yaitu golongan masyarakat kecil. Golongan Santana berada di antara golongan menak dan golongan cacah (cacah kuricah) atau somah (rakyat kecil).

Menak adalah keturunan dari raja-raja Sunda tetapi dalam perjalanannya menak mengalami pasang surut karena tataran Sunda terjadi fluktuasi kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat. Sejarah Tatar Sunda dimulai dengan Kerajaan Tarumanegara, Selama beberapa abad pusat kerajaan berpindah-pindah, dimulai dari Kerajaan Galuh (Ciamis sekarang), kemudian pindah ke Pakuan

Pajajaran (daerah Bogor sekarang),. Setelah Kerajaan Sunda runtuh, wilayah kekuasaannya yang hampir meliputi seluruh Provinsi Jawa Barat sekarang ditambah sebagian Jawa Tengah, terbagi-bagi ke dalam empat pusat kekuasaan yaitu Banten, Cirebon, Sumedanglarang, dan Galuh yang setelah kepindahan pusat kerajaan ke Pakuan Pajajaran masih tetap eksis sebagai kerajaan kecil. Sekitar tahun 1620 Sumedanglarang menyerah kepada Mataram. Kekuasaan Mataram atas Priangan berakhir dengan adanya perjanjian antara Mataram dengan VOC. Dari kekuasaan VOC berpindah pada kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.⁴³

Perjalanan itu membawa perubahan kepada kekuasaan menak yang semula merupakan raja-raja di Jawa Barat kemudian setelah di bawah kekuasaan Mataram kurang lebih dua abad raja-raja Jawa Barat berubah menjadi bupati kemudian setelah Mataram menyerahkan wilayah Jawa Barat kepada VOC berpindah lagi pada Hindia Belanda, Kemudian pada Inggris dan

⁴³ Tentang Menak telah ditulis dengan panjang lebar oleh Nina Lubis dalam penelitian Disertasi yang kemudian menjadi sebuah buku yaitu Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942. Op.Cit.*, hlm 56-111

kepada Hindia kembali kedudukan tertinggi para menak adalah bupati.

Pewarisan jabatan bersifat turun temurun bagaikan jabatan raja. Sejak zaman kerajaan Sunda jabatan raja biasanya diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak laki-laki tertua dari permaisuri (kecuali bila calon putra mahkota tidak memenuhi syarat). Setelah Kerajaan Sunda runtuh, Sumedanglarang dan Kerajaan Galuh sebagai pusat politik yang baru juga menganut prinsip yang sama. Kedudukan Nalendra (Raja) Sumedanglarang diwariskan secara turun temurun, demikian juga kedudukan penguasa di Galuh. Pada masa kekuasaan Mataram para penguasa di Priangan diangkat menjadi “mantra agung” oleh Sultan Mataram dan berkedudukan sebagai kepala rakyat setempat. Jabatan sebagai kepala rakyat ini pada mulanya bisa dicabut atau dialihkan kepada orang lain sesuai dengan kehendak raja, tetapi lama-kelamaan jabatan ini dapat diwariskan demi menjaga kelangsungan pemerintahan.⁴⁴

Setelah kekuasaan Sultan Mataram berakhir, prinsip pewarisan jabatan tersebut mendapat dukungan

⁴⁴ Soeria Nata Atmadja dalam Nina Lubis, *Ibid*

pemerintah kolonial sejak masa VOC hingga Pemerintah Hindia Belanda. Adanya dukungan ini disebabkan pemerintah kolonial menyadari bahwa kepala rakyat memiliki otoritas tradisional. Rakyat pribumi mempunyai anggapan khusus tentang wibawa dan tradisi pemimpin mereka.⁴⁵ Adapun jabatan-jabatan yang lebih rendah dari Bupati, seperti patih, wedana, asisten-wedana, mantra dan jaksa, seringkali tidak langsung bersifat turun temurun. Kaum menak yang lebih rendah menduduki jabatan-jabatan tersebut secara formal dengan surat pengangkatan dari Pemerintah Hindia Belanda.⁴⁶

Dalam perkembangan sejarah, konsep tentang kekuasaan dalam tradisi Sunda mengalami perubahan-perubahan baik karena faktor intern maupun ekstern. Dalam tradisi Sunda sebelum pengaruh Mataram masuk, konsep yang bertalian dengan asal-usul dan pelegitimasi kekuasaan tersirat dalam naskah *Amanat dari Galunggung*. Dalam naskah ini dinyatakan bahwa seseorang dapat menjadi penguasa disuatu daerah apabila ia menguasai *kabuyutan* di daerah tersebut. *Kabuyutan*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Edi S. Ekadjati (ed), *Wawacan Carios Munada* (Bandung: Fakultas Sastra Unpad, 1993) hlm 11

(mandala) adalah tempat keramat atau tempat suci yang mempunyai fungsi sebagai pekuburan leluhur atau tempat pemujaan. *Kabuyutan* merupakan tempat yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan apabila mendapat serangan dari musuh. Menurut ungkapan ini, kekuasaan berasal dari sesuatu yang keramat, adikodrati, sedangkan kekayaan hanyalah atribut kekuasaan.⁴⁷

Setelah kekuasaan Mataram berakhir, konsep kekuasaan berubah. Dalam berbagai sumber historiografi tradisional banyak disebut konsep *pulung* atau wahyu sebagai asal kekuasaan. Misalnya, dalam *sejarah sukapura* disebutkan bahwa seseorang itu bisa menjadi bupati bila dititisi *pulung* bupati terdahulu, sedangkan dalam roman sejarah Pangeran Kornel disebutkan bahwa seseorang bisa berkuasa apabila *katibanan nurbuat* atau *nampi wahyu* (dijatuhi nurbuat atau menerima wahyu). Konsep wahyu dikenal dalam tradisi Jawa antara lain sebagai pertanda rahmat atau kurnia dari Yang Maha Kuasa bagi kedudukan raja yang sering digambarkan sebagai bola cahaya biru, hijau, atau putih yang menyilaukan. Akan tetapi, dalam sumber yang ditulis Sastrahadiprawira tadi, istilah *pulung*,

⁴⁷ Nina Lubis, Op.Cit., hlm 56-68

wahyu, atau *nurbuat* diartikan sebagai anugerah Tuhan. Konsep tersebut tidak memiliki bentuk fisik seperti dalam tradisi Jawa.

Pengaruh Islam sebenarnya secara eksplisit dapat dilihat dalam konsep *cahaya nurbuat*. Konsep ini secara implisit terdapat dalam sebuah surat dari hoofddjaksa Garut kepada Bupati Sumedang tahun 1883; “... *salat ta’at salat hajat, njaeta noediteda, moega pantjer Oeyoat Taloenn, diganjar tjahja nurbuat...*” (artinya;... salat taat salah hajat, itulah yang dimohon, semoga pokok Uyut Talun, dianugerahi cahaya nurbuat...). Jadi bisa ditangkap maknanya demikian, anugerah berupa cahaya nurbuat itu bisa diperoleh berkat sembahyang sunat yang dilakukan yaitu taat (?) dan shalat hajat.⁴⁸

Dalam suatu sumber disebutkan bahwa seseorang sah menjadi penguasa apabila, ia *terusing ratu, menak rembesing kusumah* (keturunan ratu, menak titisan bangsawan) artinya ia adalah keturunan leluhur yang agung dan tak ternoda. Konsep di atas tidak ada bedanya dengan konsep *terahing kusumah, rembesing madu,*

⁴⁸ Memed Sastrahadiprawira, *Pangeran Kornel* (Bandung: Rahmat Cijulang, 1986) hlm 36-91

wijining atapa, tedhaking andana warih (turunan bunga, titisan madu, benih pertapa, turunan mulia) yang dikenal dalam tradisi Mataram.⁴⁹ Ungkapan ini tidak lain dari prinsip kharisma yang ada pada tokoh berwibawa, tokoh unggul. Kaum menak yang duduk dalam jabatan pemerintahan tradisional, jelas diangkat oleh pemerintah kolonial (artinya kekuasaan berasal dari pemerintah kolonial) sehingga mereka memiliki kekuasaan meskipun semu.

Dalam *Wawacan Sajarah Galuh*, penguasaan Mataram atas Priangan tidak disinggung sama sekali, sedangkan dalam *Babad Sumedang* disebutkan bahwa *Panembahan Senopati* menguasai Pasundan tanpa peperangan. Dalam sumber lain disebutkan bahwa masuknya kekuasaan Mataram ke Priangan diibaratkan sebagai angin topan meniup pepohonan sehingga pohon-pohon itu roboh tak berdaya.⁵⁰

Lain halnya ketika Priangan jatuh ketangan VOC. Untuk membenaran penguasaan VOC atas Priangan dalam

⁴⁹ Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985) hlm 62. Lihat juga G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa* (Yogyakarta: Kanisius, 1987) hlm 26

⁵⁰ Sastrahadiprawira, *Op. Cit.*, hlm 14

Wawacan Sajarah Galuh diceritakan sebuah ramalan yang bersipat *post-eventum*; ”kekuasaan orang Belanda itu tidak dapat ditolak karena sudah diramalkan oleh seorang *ajar* (pendeta)”. Penguasa asing ini dianggap sebagai ratu adil yang akan memberikan pembalasan kepada Raja Jawa yang menyakiti hati cucu Prabu Siliwangi.⁵¹ Dalam sumber dari zaman kerajaan Sunda dinyatakan bahwa seseorang bisa menjadi penguasa atau raja bila ia putra dewata. Dalam naskah *Carita Parahiyangan, Batara Danghyang, penguasa galunggung* menyatakan demikian; *Ja beunang ku ai (ng) kawisesa, turut carekeng, ja ai(ng) wenang nuduh tan katuduh. Ja ai (ng) anak dewata*” (artinya; “Tetapi bila dapat aku kuasai turutlah perintahku, karena aku berhak memerintah, tidak diperintah. Aku ini anak dewata”).⁵²

Dari pernyataan di atas jelas bahwa raja menganggap dirinya sebagai keturunan dewa, artinya konsep “dewaraja” melekat dalam diri seorang penguasa. Upaya pelegitimasi kekuasaan semacam ini merupakan hal

⁵¹ Edi S. Ekadjati, *Wawacan Sejarah Galuh* (Bandung: EFEO, 1977) hlm 2-3

⁵² Atja dan Saleh Danasasmita, *Amanat dari Galunggung* (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981) hlm 47-49

yang lumrah dilakukan para raja pendiri dinasti. Meskipun penguasa Galunggung di atas menyatakan diri sebagai anak dewa, anehnya dalam silsilah pada bagian awal naskah, yang berada di puncak silsilah bukanlah dewa, melainkan seorang *resi guru* (pendeta), artinya seorang manusia. Meskipun hal ini bisa dianggap sebagai suatu hal yang rancu, bisa dipahami bila ditafsirkan bahwa si penulis naskah mencoba bersikap realistik.

Pada masa sesudah agama Islam berpengaruh kuat, tokoh dewa digantikan oleh tokoh-tokoh manusia yang bersipat *histories legendaries* atau tokoh-tokoh besar yang dihormati masyarakat seperti Nabi. Misalnya, dalam *Carita Purwa Caruban Nagari* diceritakan bagaimana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) dilegitimaskan sebagai penguasa Cirebon sekaligus sebagai penyebar agama Islam di Jawa Barat. Silsilahnya dibuat demikian; dari pihak ayah, Sunan Gunung Djati adalah keturunan ke-22 Nabi Muhammad s.a.w., dan dari pihak ibu, ia adalah cucu Prabu Siliwangi, Raja Padjadjaran yang legendaris. Ada cara lain untuk melegitimasi kekuasaan, yaitu dengan pemberian pusaka atau gelar untuk membuktikan adanya kesinambungan antara penguasa baru dan lama.

Misalnya, dalam *Carita Purwaka Caruban Nagari*, diceritakan bahwa Prabu Siliwangi, Raja Padjadjaran merestui putranya, Pangeran Cakrabuana menjadi Penguasa Caruban (nantinya menjadi Cirebon) dengan cara mengirimkan tanda keprabuan dan memberi gelar penobatan, Sri Mangana.⁵³

Ada cara lain lagi untuk melegitimasi kekuasaan. Dalam Sajarah Sukapura secara implisit dikemukakan pelegitimasi kekuasaan VOC dan Pemerintah Hindia Belanda atas Priangan. Menurut penulis naskah tersebut, ada beberapa alasan untuk taat kepada Kompeni (orang Belanda). *Pertama*, mereka tidak perlu merasa bersalah kalau taat kepada orang asing sebab yang menyerahkan mereka kepada Kompeni adalah Sunan Mataram, penguasa Priangan sebelumnya. *Kedua*, berada di bawah Kompeni, keadaan menjadi lebih baik karena tidak perlu lagi “tugurtundan” (menjaga keamanan dan mengangkut barang atau orang) di Mataram yang jaraknya sangat jauh. *Ketiga*, tidak ada tuntutan atau permintaan kecuali

⁵³ Atja, *Carita Purwaka Caruban Nagari* (Bandung: Ikatan Karyawan Museum, 1972) hlm 10 dan lihat juga M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991) hlm 57

menghiasi atau memperindah daerah sendiri. *Keempat*, pekerjaan dibagi-bagi sesuai dengan kekuatan masing-masing. *Kelima*, tidak perlu mengeluarkan upeti dua kali. Dulu, selain menyerahkan upeti kepada penguasa setempat, rakyat juga harus menyerahkan upeti ke Mataram. Setelah Mataram tidak berkuasa, upeti hanya untuk penguasa setempat saja. *Keenam*, keamanan terpelihara karena ada polisi.⁵⁴

Perintah Kompeni hanyalah menanam kopi dan hasilnya pun dibeli. Tentu saja masih harus diperdebatkan, apakah alasan ini dikemukakan secara sungguh-sungguh atau sekedar menyenangkan yang menjadi atasan. Bila melihat bahwa penulisnya adalah seorang Wedana di Manonjaya yang mendapat title “Kanduruan” dari Pemerintah Hindia Belanda sebagai penghargaan atas jasa-jasa pengabdianya, bukan tak mungkin alasan pembenaran kekuasaan VOC itu untuk menyenangkan atasan.⁵⁵

Simbol kekuasaan kaum menak seperti telah dikemukakan, berbagai simbol dipergunakan dalam

⁵⁴ Nina Lubis, *Op.Cit.*, hlm 60

⁵⁵ *Ibid*

berbagai aspek kehidupan menak, termasuk soal kekuasaan dan kedudukan. Kekuasaan acapkali dikiaskan dengan kata “payung”. Misalnya, ketika kedudukan Bupati Sumedang diisi oleh keturunan Bupati Parakanmuncang karena putra tertua Bupati Sumedang yang berhak atas jabatan itu masih kecil, dikalangan menak Sumedang ada istilah “*payung direbut batur*” artinya kekuasaan direbut orang lain. Putera Bupati Sumedang yang kelak terkenal sebagai Pangeran Kornel setelah dewasa menikah dengan putri Bupati Parakanmuncang. Akan tetapi, ia terpaksa lari ke Cianjur karena tidak disukai oleh mertuanya. Ternyata ia bernasib baik, ia diangkat menjadi *cutak* cicalong. Ketika saudaranya menjemput ke Cianjur, ia menyatakan “*satungtung teu acan dipayungan bodas pulas emas moal nete Sumedang*” (selama belum dipayungi payung putih seleret emas ia tidak akan menginjak Sumedang). Kata “payung putih” di sini diasosiasikan dengan “payung kebesaran” atau “*songsong*” yang merupakan regalia atau alat-alat pusaka milik seorang bupati yang derajatnya paling tinggi. Pada zaman Mataram payung kebesaran ini disebut *payung bawat*. Sejak tahun 1820 Pemerintah

Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang kelengkapan upacara yang boleh dimiliki para pejabat pribumi sesuai dengan tingkatan jabatannya. Salah satu regalia yang penting adalah *payung*.⁵⁶

Besarnya kekuasaan seorang raja terhadap rakyatnya dilukiskan dengan kata-kata; “raja adalah pemilik jiwa raga serta yang menentukan hidup mati seseorang”. Oleh karena itu, kekuasaan seorang raja tidak boleh dilawan bila tidak ingin celaka. Atasan wajib dipuja dan dihormat. Hal ini tercermin dalam ungkapan “*guru ratu wong atua karo*”,⁵⁷ artinya harus taat kepada guru yang memberikan ilmu, taat kepada ratu (penguasa) yang *murba* (menguasai) negara, dan taat kepada orang tua. Rakyat wajib ngawula kepada penguasa sehingga bupati juga sering disebut *pangawulaan dalem*. Sebaliknya, penguasa juga wajib dilindungi rakyat.⁵⁸ Di sini tampak bahwa ada hubungan timbal balik yang perlu dijaga antara penguasa dengan yang dikuasai karena keduanya saling melengkapi dan

⁵⁶ Sastrahadiprawira, *Op. Cit.*, hlm 39

⁵⁷ R.A.A. Martanagara, *Babad Sumedang*, edisi Edi S. Ekadjati dan Said Raksakusumah (Bandung: Fakultas Sastra Unpad, 1981) hlm 4

⁵⁸ *Ibid*

saling membutuhkan. Hal ini bisa dianalogikan dengan konsep *kawula-gusti* dalam tradisi Jawa.⁵⁹

Besarnya kekuasaan Raja Sunda dalam kacamata penulis tradisional abad ke-19 dapat diukur dengan istilah yang terdapat dalam *babad limbangan*. Dalam sumber ini Raja Pajajaran disebut *Ratu Murba Wisesa* (*murba* artinya menguasai dan *wisesa* artinya kekuasaan tertinggi). Istilah *murbawisesa* juga dikenakan kepada bupati selaku penguasa kabupaten. Dengan kekuasaan seperti ini diharapkan bahwa seorang bupati bisa menjadi “*tunggul payung sadayana para wargi*” (tempat berlindung semua sanak saudara) atau bisa “*ngauban baraya*” (melindungi sanak keluarga). Seorang bupati bukan hanya menjadi penguasa wilayah, melainkan juga menjadi pemilik wilayah itu, termasuk penghuninya. Apabila bupati menghendaki sesuatu, misalnya ternak, wanita atau sekedar hasil bumi, tak ada seorangpun yang dapat menghalanginya. Dalam tradisi lisan dikenal ungkapan; “*kutu-kutu walang taga, serebuk samerang bulu, eta*

⁵⁹ Soemarsaid Moertono, *Op.Cit.*, hlm 25

kabeh kagungan ratu” (macam-macam kutu, bubuk kecil sebesar bubuk padi, itu semuanya kepunyaan ratu).⁶⁰

Besarnya kekuasaan *menak* bukan diukur dari luasnya wilayah yang dikuasai, melainkan dari jumlah *cacah* yang dimilikinya. Jadi dalam hal ini *cacah* dianggap sebagai harta benda. Di kalangan *menak* dikenal suatu tradisi yang disebut *nyanggrah*, yaitu memaksakan kehendak kepada rakyat jelata. Bilamana menginginkan sesuatu, siapapun tidak bisa menolak. Misalnya saja bila *menak* ingin menyanggrah wanita, cukup dengan meminta kepada orang tuanya untuk tidak mengawinkan sigadis atau langsung membawa sigadis ke ibu kota. Tradisi *nyanggrah* ternyata bukan hanya dilakukan oleh bupati saja, kaum *menak* di bawah pun bisa melakukan hal itu. Yang disanggrahi bukan hanya anak gadis, melainkan juga ternak dan harta benda lainnya. Bila seorang *menak* menginginkan kuda milik rakyatnya, cukup ia menggunting bulu suri kuda tersebut dan itu berarti kuda sudah menjadi miliknya.⁶¹

⁶⁰ Nina Lubis, *Op.Cit*, 62-63

⁶¹ *Ibid*

Perubahan terjadi ketika pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis. Fungsi bupati dicoba dibersihkan dari tradisi lama. Mereka harus dianggap hanya sebagai salah satu mata rantai dalam dunia birokrasi. Karena itu, mereka perlu lebih mendapatkan pendidikan demi tuntutan efisiensi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada mereka. Pemerintah Belanda menyediakan pendidikan bagi putra-putra kepala pribumi. Ternyata pendidikan ini bagai pedang bermata dua. Di samping menghasilkan tenaga-tenaga pribumi terdidik, pendidikan Barat juga menghasilkan suatu generasi yang memiliki jiwa baru, antara lain jiwa demokrasi yang diimpor dari Barat. Nilai-nilai baru ini selanjutnya menghasilkan suatu kesadaran berbangsa dan melahirkan organisasi-organisasi pergerakan di antaranya adalah Organisasi Paguyuban Pasundan yang didirikan oleh para menak berpendidikan Barat (akan dibahas dalam Bab III)

Dampak dari pendidikan itu di kalangan putra-putra kaum menak sendiri mulai timbul kecenderungan lain; mereka lebih memilih pendidikan gaya Barat seperti H.B.S. dan perguruan tinggi lainnya bila dibandingkan dengan pendidikan khusus kejuruan untuk para calon

amentar (OSVIA). Setelah lulus, kaum menak muda ini lebih senang memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang bukan pegawai negeri. Sementara itu kaum muda dari kalangan bukan menak, banyak yang memilih pendidikan OSVIA agar nantinya dapat duduk dalam jabatan birokrasi. Mereka inilah yang nantinya dianggap sebagai pendatang baru dikalangan kaum menak lama.

Perkembangan ini telah membawa gamang/samar perkembangan menak di Jawa Barat. Birokrasi tidak lagi menjadi unsur utama turun temurun menak. Putra-putra menak lama banyak terjun di dunia pergerakan kemerdekaan seperti Paguyuban Pasundan. Akan tetapi masih dapat dikenal putra-putra keturunan menak lama yang merupakan keturunan raja-raja Sunda dari gelar kebangsawanannya seperti menggunakan gelar kusuma, ningrat, suria dan nagara. Walaupun tidak memiliki wilayah dan kedudukan sebagaimana menak sebelumnya. Di Jawa Barat yang masih dikenal melalui situs-situs sejarah kerajaan hanya terdapat di Keraton Cirebon, Keraton Sumedanglarang dan Keraton Galuh di Ciamis. Banten pada tahun 2002 memisahkan diri menjadi provinsi tersendiri.

Kaum *menak* yang menjadi pejabat birokrasi, pada umumnya harus memiliki otoritas tradisioal yang mereka peroleh karena kelahiran (keturunan). Jadi, pada umumnya mereka memiliki kepemimpinan tradisional. Di antara para bupati di Priangan yang terkenal ada yang disebut-sebut memiliki kemampuan luar biasa. Akan tetapi hal itu tidak cukup untuk mengkategorikannya sebagai pemimpin kharismatik.

Sebagai akibat pendidikan Barat yang diperkenalkan sejak pertengahan abad ke-19 dan semakin intensif lagi pada awal abad ke-20, di Jawa lahir golongan masyarakat baru yaitu kaum intelektual atau golongan cendekiawan. Di antara kaum cendekiawan ini terdapat kaum menak yang disebut sebagai menak intelektual. Sebagian di antara mereka ada yang ikut dalam pergerakan nasional. Tokoh-tokoh ini memiliki sifat kepemimpinan yang berbeda dari tokoh-tokoh *menak birokrat*. Oleh karena itu masalah kepemimpinan kaum *menak* dapat dibedakan antara kepemimpinan kaum *menak* yang duduk dalam birokrasi tradisional dan kepemimpinan kaum *menak intelektual*.

4.1.4. Awal Masuknya Islam di Jawa Barat

Awal masuknya Islam ke Jawa Barat terdapat beberapa versi antara lain: pertama, versi yang mengatakan bahwa sejarah masuknya Islam di Tatar Sunda berawal dari seorang pemeluk agama Islam yang pertama kali di tanah Sunda adalah Bratalegawa putera kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewabrata atau Sang Bunisora penguasa kerajaan Galuh. Ia memilih hidupnya sebagai saudagar besar, biasa berlayar ke Sumatera, Cina, India, Srilangka, Iran, sampai ke negeri Arab. Ia menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Melalui pernikahan dengan seorang muslimah ini, Bratalegawa memeluk agama Islam, kemudian menunaikan ibadah haji dan mendapat julukan Haji Baharudin. Sebagai seorang yang pertama kali menunaikan ibadah haji di kerajaannya ia pun di kenal dengan sebutan Haji Purwa.⁶²

Versi kedua bahwa sejarah masuknya Islam ke Jawa Barat dari Karawang karena, di Karawang terdapat sebuah

⁶² Pembahasan Islam di Jawa Barat lihat Yuyus Suherman, *Sejarah Perintisan Penyebaran Islam di Tatar Sunda* (Bandung: Pustaka, 1995) dan lihat Nina Lubis dkk., *Sejarah Tatar Sunda* (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2003) Jilid 1 hlml 155-239

pesantren di bawah pimpinan Syekh Quro sebagai penyebar dan guru agama Islam pertama di daerah Karawang. Syekh Quro nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin putra Syekh Yusuf Sidik, seorang ulama yang datang dari negeri Campa (daerah Vietnam sekarang). Ia datang di Pulau Jawa sebagai utusan pada abad ke-14 sezaman dengan kedatangan Syekh Datuk Kahpi menumpang kapal yang dipimpin Laksamana Cheng Ho dalam perjalanannya menuju Majapahit. Dalam pelayarannya itu, armada Cheng Ho tiba di Pura Karawang. Syekh Hasanuddin beserta para pengiringnya turun di Karawang dan bertempat tinggal di sana. Di Karawang ia menikah dengan Ratna Sondari, putri Ki Gedeng Karawang, dan membuka pesantren yang diberi nama pondok Quro yang khusus mengajarkan al-Qur'an, karena itulah Syekh Hasanuddin kemudian dikenal dengan nama Syekh Quro. Syekh Quro bermukim di Karawang sampai wafat dan dimakamkan di Desa Pulo Kalapa Kecamatan Wadas Karawang.⁶³

Sumber lain yang menunjukkan datangnya Islam pertama kali di Jawa Barat dibawa Syekh Nurjati yang

⁶³ *Ensiklopedi Sunda* (Bandung: Pustaka Jaya, 2000) hlm 639

disebut pula Syekh Datuk Kahpi, Syekh Idofi, atau Syekh Nuruljati, seorang ulama yang berasal dari Arab (Persi). Ia datang sebagai utusan Raja Persi bersama 12 orang pengikutnya sekitar abad ke-14, pada masa Ki Gedeng Jumajanjati. Atas ijin dan kebaikan penguasa pelabuhan itu, Syekh Nurjati kemudian menetap dan bermukim di Pasambangan di bukit Amparan Jati dekat pelabuhan Muarajati, kurang lebih lima kilometer sebelah Utara Kota Cirebon sekarang. Ia kemudian menjadi guru agama Islam dan mendirikan pesantren yang tumbuh menjadi sebuah pesantren yang cukup ramai. Pesantren Muarajati lebih berkembang lagi ketika datangnya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati dari Mesir.⁶⁴

Tokoh Syarif Hidayatullah⁶⁵ (1448-1568) yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati (SGJ) sejauh ini dianggap sebagai tokoh penyebar agama Islam di tanah

⁶⁴ Dadan Wildan, *Sunan Gunung Jati antara Fiksi dan Fakta: Pembumian Islam dengan Pendekatan Struktural dan Kultural*, (Bandung : Humaniora Press, 2002), hlm. 25-29

⁶⁵ Menurut naskah-naskah tradisi Cirebon ia lahir di Mesir tahun 1448, ayahnya bernama Syarif Abdullah seorang bangsawan Mesir yang dianggap keturunan Nabi Muhammad SAW dan ibunya Rarasantang, putri Prabu Siliwangi yang menikah dengan gadis muslim Subanglarang. Syarif Abdullah menikahi Rarasantang ketika Rarasantang menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

Sunda dan penegak kekuasaan Islam pertama di Cirebon. Dalam perjalanannya ke Cirebon ia singgah di Pasai dan tinggal bersama Maulana Ishak, kemudian tiba di pelabuhan Muara Jati (Cirebon) lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Sembung-Pasambangan dekat Giri Amparan Jati pada tahun 1475.⁶⁶

Di daerah pedalaman Sunda Islamisasi dilakukan oleh kerajaan Sumedanglarang di mana pada tahun 1530 Masehi Sumedanglarang ditaklukan kerajaan Cirebon. Raja Sumedanglarang yang menganut agama Islam adalah Ki Gedeng Sumedang atau dikenal dengan nama Pangeran Santri yang berkedudukan sebagai bawahan Cirebon. Kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Pangeran Angkawijaya dengan gelar Geusan Ulun Sumedanglarang. Kekuasaan Geusan Ulun meliputi Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Bandung.⁶⁷

Dengan demikian peyebaran Islam di Jawa Barat dari arah utara oleh kerajaan Cirebon sebagai titik awal masuknya Islam ke tatar Sunda kemudian dari arah selatan

⁶⁶ Lihat Pangeran Sulaeman Sulendraningrat, *Nukilan Sedjarah Tjirebon Asli* (Cirebon: Pustaka Cirebon, 1968), hlm. 7, lihat juga Sharon Siddique, *Relics of the Past? A Sociological Study of the Sultanates of Cirebon, West Java*. (Disertasi, 1977), hlm 64-65

⁶⁷ Yoseph Iskandar, *Op.Cit.*, hlm 294-304

oleh kerajaan Banten yaitu oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon sedangkan untuk daerah pedalaman yang meliputi daerah priangan melalui kerajaan Sumedanglarang sebagai bawahan kerajaan Cirebon.

4.1.5. Gerakan Politik Islam Radikal

Gerakan politik Islam secara radikal di Jawa Barat yakni adanya peristiwa pemberontakan Darul Islam (DI/TII) yang diprakarsai Kartosoewiryo pada tahun 1948-1968.⁶⁸ Kartosoewiryo dilahirkan di Jawa Timur pada tanggal 7 Pebruari 1905. Ia putra seorang tokoh pegawai rendah pangreh praja Belanda. Ia memperoleh pendidikan dan kepandaian berbahasa Belanda dengan tamat dari sekolah rendah Eropa (*Europese Lagere School*) dan belajar pada sekolah dokter Hindia-Belanda

⁶⁸ Pembahasan lebih konfrehensif tentang DI/TII lihat Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat* (Jakarta: Grafiti, 1990), Hiroko Horikoshi, *Kiyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987). Dan lihat juga Van Dijk, C.Q., *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafiti, 1993).

(*Nederlands-Indische Artsen School*, NIAS) di Surabaya.⁶⁹

Pada tahun 1926 ia diusir dari sekolah kedokteran itu karena kegiatan-kegiatan politik radikal kiri. Pada tahun 1927 ia menjadi anggota Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). H.O.S. Tjokroaminoto, pendiri kharismatik gerakan massa Indonesia yang pertama yakni Sarekat Islam. Ia menjadi ayah angkat dan pelindung Kartosoewiryo.⁷⁰ Setelah mengabdikan dua tahun sebagai sekretaris pribadi Tjokroaminoto dari tahun 1927 sampai 1929, Kartosoewiryo sakit parah dan tetirah ke desa asal istrinya di Malangbong Garut, Jawa Barat. Ayah mertuanya seorang kiyai setempat yang terkenal bernama Ardiwisastra. Jadi melalui perkawinannya Kartosoewiryo memperoleh akses ke dalam jaringan luar para kiyai di daerah itu yang dua dasawarsa setelah itu akan mengabdikan sebagai jantung Darul Islam.

Pada tahun 1929 ia menjadi komisaris PSII untuk Jawa Barat dan dua tahun kemudian menjadi sekretaris

⁶⁹ Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo*, (Jakarta, PT Badan Penerbit Aryaguna, 1964) hlm. 20-21

⁷⁰ Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1985) hlm 55

umum PSII. Setelah wafatnya Tjokroaminoto pada tahun 1934, PSII compang-camping dikoyak-koyak persaingan antara berbagai faksi di dalam tubuhnya. Kartosoewiryo dipilih sebagai wakil ketua partai pada tahun 1936 dan menjadi salah seorang juru bicara utama bagi nonkooperasi menyeluruh dengan lembaga-lembaga pemerintahan Belanda.

Dalam suatu kasus, Kartosoewiryo dikeluarkan dari partai dan pada bulan Maret 1940 Komite Pembela Kebenaran (KPK) yang pernah didirikannya pada waktu aktif di partai muncul sebagai partai politik baru. Sekaligus Kartosoewiryo mendirikan lembaga Suffahnya di Malangbong.⁷¹ Lembaga itu adalah sebuah pesantren, di mana para santri tinggal selama empat sampai enam bulan. Cara hidup menekankan pertarikan, mengendalikan diri sendiri, persamaan dan ketekunan beragama. Hak milik perseorangan dikumpulkan, kerja keras dituntut dari semua orang (bahkan dari Kartosoewiryo sekalipun) dan pelajaran diberikan di dalam pokok acara sedemikian

⁷¹ Nama Suffah mengacu kepada lembaga yang ada pada masa Rasulullah, di mana para murid diajar Rasulullah sendiri mengenai cara-cara melakukan dakwah Islam. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982)

beragam seperti bahasa Belanda, astronomi dan aliran tasawuf Islam yang diikuti Kartosoewiryo sepanjang kariernya.⁷²

Pada masa pendudukan Jepang pada mulanya menghentikan semua kegiatan partai, termasuk KPK. Maka lembaga Suffah menjadi pesantren konvensional dan tidak berpolitik. Namun pada tahun 1945 misi politik Lembaga suffah dibangkitkan kembali ketika lembaga itu menjadi tempat melatih (dengan bantuan Jepang) seksi pemuda Laskar Masyumi, yang dikenal sebagai Hizbullah. Jumlah orang yang dilatih boleh jadi kurang dari 2000 orang, tetapi pentingnya mereka bagi Darul Islam diperbesar oleh jumlah pengikut-pengikut yang jauh lebih besar, yang para santrinya terbukti mampu mengerahkannya dari desa-desa asal mereka di Priangan dan Jawa Tengah. Tokoh-tokoh utama Darul Islam seperti Kamran, Zainal Abidin dan Oni semuanya pernah di KPK atau dilatih pada lembaga Suffah. Pada tanggal 24 April 1962 Imam NII terluka dalam suatu tembak-menembak. Ia tertawan pada tanggal 4 Juni dan diadili pada bulan

⁷² Pinardi, *Op. Cit.*, hlm. 27-28 dan lihat Deliar Noer, *Ibid.*, hlm 148-149

Agustus. Pada tanggal 12 September (pada sidang peradilan yang berkaitan) hakim ketua mengumumkan bahwa Kartosoewiryo tidak akan dapat memberikan kesaksian karena ia telah ditembak mati.⁷³

Kartosoewiryo mula-mula memproklamasikan Negara Islam pada 14 Agustus 1945, tetapi kemudian memberikan dukungannya kepada Republik yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta.⁷⁴ Sosok nasionalnya diakui ketika koalisi kekuatan-kekuatan politik kaum muslimin, Masyumi, direorganisasikan sebagai partai politik pada bulan November 1945. Pada waktu itu Kartosoewiryo diangkat menjadi anggota Dewan Pimpinan Partai dan kemudian menjadi komisarisnya untuk Jawa Barat.

Kemunculan pemberontakan DI/TII paling tidak ada dua faktor yang melatar belakangnya yaitu *pertama*, terjadinya kekosongan politik di masa awal kemerdekaan dengan munculnya agresi militer ke I dan II Belanda dilanjutkan dengan perjanjian Linggarjati dan Renville, di

⁷³ Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat* (Jakarta: Grafiti, 1990) hlm 30-32

⁷⁴ Boland, *Op.Cit.*, hlm 57

mana secara politis sangat merugikan Indonesia sehingga muncul kekecewaan bagi Kartosoewiryo di Jawa Barat yang harus meninggalkan Jawa Barat hijrah ke Yogyakarta. Kekecewaan itu sekaligus sebagai kesempatan bagi Kartosoewiryo untuk melaksanakan niatnya mendeklarasikan Negara Islam di Jawa Barat bahkan di Indonesia.

Pada awalnya Keputusan Kartosoewiryo untuk meneruskan perjuangan bersenjata melawan Belanda secara diam-diam didukung Republik, khususnya para anggota Masyumi. Pada bulan November 1947 Masyumi Daerah Jawa Barat di bawah Kartosoewiryo bertindak mengkoordinasikan usaha-usaha mengusir Belanda dengan usaha mendirikan Negara Islam. Konferensi yang diadakan di Gunung Cupu, Jawa Barat bagian Tenggara, mendirikan badan-badan koordinasi untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan militer Hizbullah dan Sabilillah melawan Belanda di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu Majelis Umat Islam dibentuk untuk mengkoordinasikan semua organisasi Muslimin di Jawa Barat, dan untuk meneruskan perjuangan bersenjata melawan pasukan kolonial. Semua pasukan tempur

menjadi bagian Tentara Islam Indonesia (TII) dan pasukan-pasukan pilihan dihimpun dalam Pahlawan Darul Islam (PADI). Pada bulan Mei 1948 Kartosoewiryo mengumumkan dirinya sendiri sebagai Imam, membentuk kabinet, mempersiapkan Undang-Undang Dasar serta merencanakan struktur sipil dan militer bagi negara baru itu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar pada tanggal 27 Desember 1948, Negara Islam Indonesia didirikan secara formal sebagai kesatuan politik yang terpisah. Selama periode ini Darul Islam bergerilya menentang tentara Belanda dan Negara Pasundan yang didalangi Belanda. Pasukan-pasukan militer Pasundan dan Belanda terkurung di kota-kota dan jalan-jalan utama, sedangkan Darul Islam menguasai pedesaan selaku satu-satunya kekuatan besar nasionalis yang tidak meninggalkan Jawa Barat. Akibat terpenting Persetujuan Renville adalah membuat jihad Kartosoewiryo satu-satunya gerakan kemerdekaan yang dapat dipercaya di Jawa Barat untuk satu setengah tahun terakhir revolusi Indonesia. Jadi memberikan kepada Darul Islam bulan-

bulan berharga untuk menegakkan legitimasi tentara dan pemerintahan sipilnya.

Pangkalan-pangkalan terpenting Darul Islam adalah di Keresidenan Priangan yang meliputi kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis, tiga kabupaten terakhir yang merupakan wilayah-wilayah teras dukungan bagi gerakan itu.⁷⁵ Kantong-kantong kekuatan Darul Islam terdapat pula di sekitar Bogor, di dekat Indramayu di pantai utara dan lewat perbatasan Jawa Tengah.⁷⁶

Dengan dukungan politik yang dipelihara selama tak hadirnya para pembesar Republikein dari Jawa Barat, dan sebagai tanda keengganan Kartosoewiryo untuk menerima syarat-syarat kemerdekaan yang diperoleh Republik dari Belanda, pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosoewiryo membuat pengumuman formal eksistensi Negara Islam yang meliputi seluruh Indonesia. Sejak aksi polisional kedua dan seterusnya Kartosoewiryo menganggap Jawa Barat sebagai wilayah *de facto* NII. Ketika Divisi Siliwangi dari Tentara Nasional Indonesia kembali ke

⁷⁵ Sadjidiman, *Sejarah Militer Angkatan Darat* (1958)

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 22

Jawa Barat selama awal 1949, kedatangan mereka dianggap sebagai pelanggaran yang mencolok mata kewibawaan Negara berdaulat, maka bentrokan pun tidak dapat dielakkan.

Faktor kedua kuatnya niat Kartosoewiryo mendirikan Negara Islam Indonesia adalah potensi bagi pengerahan laskar Islam diberi dorongan oleh keterpencilan, terlalu kurang diwakili dan kekecewaan mengenai tujuan-tujuan Islam selama perdebatan di Konstituante serta manuver-manuver politik pada awal revolusi. Di bawah pengawasan Jepang pimpinan politik masyarakat Islam muncul sebagai kekuatan politik baru yang tegap. Namun, ketika rencana-rencana Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, jubah pimpinan nasional diserahkan kepada para pemimpin sekuler atau Islam sekedar sebutan saja. Sedangkan pemimpin yang saleh, yang mewakili struktur-struktur pengerahan keagamaan Jawa pedesaan, dilorot ketidakberdayaan politik. Orang-orang seperti Soekarno dan Hatta-lah di kalangan angkatan yang lebih tua yang paling berpengaruh dalam menentukan warna Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya tidak teokratis.

Jelaslah bahwa kekuatan-kekuatan Islam ortodoks telah kalah dalam perjuangan mereka untuk menjadikan terang-terangan bersifat Islam serta bertanggungjawab untuk memaksakan syari'at Islam.⁷⁷

Dengan kedua faktor itulah seorang Kartosoewiryo mendeklarasikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat yang menunjukkan kekecewaan kepada para pemimpin Republik atas kegagalan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perundingan-perundingan dengan pihak Belanda yang senantiasa merugikan Indonesia. Selain itu juga aspek keterwakilan golongan Islam dalam konstituante yang tidak menunjukkan keseluruhan elemen Islam terwakili dalam konstituante serta aspirasi politik golongan Islam yang kurang terakomodir secara baik dalam sidang-sidang konstituante walaupun pada akhirnya konstituante mengalami kegagalan dalam menentukan UUD sehingga diakhiri dengan lahirnya Dekrit Presiden tahun 1959.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 17

4.1.6. Gerakan Politik Islam Persuasif

Dalam uraian gerakan Islam persuasif di Jawa Barat tertuju pada dua organisasi pembaharuan yaitu Persis dan Persyarikatan Ulama dengan alasan yakni: *Pertama*, organisasi itu berdiri di Jawa Barat. *Kedua*, organisasi keagamaan tersebut lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan cara membentuk organisasi modern. *Ketiga*, kedua organisasi tersebut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik bahkan menjadi partisipan partai politik.

Persyarikatan Ulama

Persyarikatan Ulama pada awalnya merupakan organisasi sosial keagamaan. Ia bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial tetapi karena tuntutan pada masa itu, pendiri Persyarikatan Ulama yaitu K.H. Abdul Halim bergabung dalam partai Sarekat Islam pada tahun 1918 kemudian ia bergabung pula dalam MIAI bersama-sama dengan organisasi Islam lainnya. Pada zaman penjajahan Jepang Persyarikatan Ulama bergabung dalam Masyumi begitu pula setelah pasca kemerdekaan. K.H. Abdul Halim adalah salah satu Kiyai yang terakomodir dalam BPUPKI yang dibentuk Jepang sehingga berkat jasa-jasanya

mendapatkan bintang Maha Putra dari Presiden Soeharto pada tahun 1992 dan pada tahun 2008 dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 1952 Persyarikatan Ulama berubahan nama menjadi Persatuan Umat Islam (PUI).⁷⁸

Persyarikatan Ulama merupakan gerakan pembaharuan yang berdiri di daerah Majalengka Jawa Barat, dimulai pada tahun 1911 atas inisiatif Haji Abdulhalim yang lahir di Cibelerang Majalengka tahun 1887.⁷⁹

Pada tahun 1911 Halim kembali dari Mekkah kemudian mendirikan sebuah organisasi bernama *Hayatul Qulub*. *Hayatul Qulub* bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan. Yang anggota umumnya terdiri dari pedagang dan petani. Organisasi tersebut bermaksud untuk membantu anggota-anggotanya yang bergerak di bidang perdagangan dalam persaingan dengan pedagang-

⁷⁸ Lihat PW PUI Jawa Barat, *Sejarah Singkat Persatuan Umat Islam (PUI)*, (2006) dan Darun Setiady, dkk., *Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Umat* (Bandung: PW PUI Jawa Barat, 2006) hlm 251-279

⁷⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982) hlm 80-84

pedagang Cina.⁸⁰ Sekitar tahun 1915 dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap sebagai penyebab kerusuhan.

Tetapi, kegiatan-kegiatan *Hayatul Qulub* terus berjalan. Kegiatan di bidang pendidikan dilanjutkan oleh sebuah organisasi baru yang disebut *Majlisul Ilmi*.⁸¹ Pada tahun 1916 didirikan lembaga pendidikan yang bersifat modern dengan nama *Jam'iyat I'anat al-Muta'allimin*. Untuk memperbaiki mutu sekolahnya Halim berhubungan dengan Jamiat Khair dan Al-Irsyad di Jakarta.⁸²

Organisasi tersebut yang kemudian diganti menjadi Persyarikatan Ulama, diakui secara hukum oleh pemerintah pada tahun 1917 dengan bantuan O.S. Tjokroaminoto, Presiden Sarekat Islam.⁸³ Persyarikatan Ulama sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan Sarekat Islam kira-kira dari tahun 1918 sampai tahun 1933, termasuk dalam masalah-masalah perburuhan. Ia tidak

⁸⁰ Lihat PW PUI Jawa Barat, *Sejarah Singkat Persatuan Umat Islam (PUI)*, *Op.Cit.*, hlm 2-4

⁸¹ *Ibid*

⁸² Hasan Ma'arif Ambary dalam Darun Setiady, dkk., *Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Umat*, *Op.Cit.*, hlm 251-255

⁸³ Deliar Noor, *Op.Cit*

pula menolak untuk mengambil contoh lembaga-lembaga pendidikan bukan Islam⁸⁴

Persatuan Islam

Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada tahun 1920-an.⁸⁵ Pada mulanya Persis pun bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan tetapi karena tuntutan pada masa itu seperti halnya Persyarikatan Ulama, Persis pun bergabung dalam Sarekat Islam yang telah beroperasi di kota ini semenjak tahun 1913. Kemudian bergabung pula dalam MIAI. Pada masa Jepang bergabung dalam Partai Masyumi begitu pula pada masa pasca kemerdekaan bergabung dalam Masyumi dengan tokohnya Moh. Natsir. Pada masa Orde Baru Persis bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemudian pada masa reformasi bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan pada pemilu 2004 ketika PBB terpecah Persis mencabut dukungan kepada PBB yang berakibat turunnya suara PBB.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Lihat Hendi Suhendi, Solidaritas Keagamaan Jama'ah Persis, Disertasi (Bandung: Unpad, 2005)

Persis memperoleh dukungan dan partisipasi dari dua tokoh yang penting, yaitu Ahmad Hassan yang dianggap sebagai guru Persis dan Mohammad Natsir yang bertindak sebagai juru bicara dari organisasi tersebut dalam kalangan kaum terpelajar.⁸⁶ Mohammad Natsir kemudian banyak aktif didunia politik yang kemudian menjadi Ketua Umum Masyumi dan menjadi Perdana Menteri pertam RI. Ia terus aktif sampai akhir hayatnya sebagai Ketua DDI dan bagian dari Petisi 50 yang menjadi oposisi terhadap pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian ia aktif sebagai aktifis mulai sebelum kemerdekaan, zaman Orla dan Orba. Pada tahun 2008, ia dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Persis lebih banyak bergerak dalam bidang Pendidikan Islam, Persis juga mendirikan sebuah pesantren (disebut Pesantren Persis) di Bandung pada bulan Maret 1936. Dalam aspek publikasi Persis menerbitkan beberapa majalah. Majalah *Pembela Islam* yang terbit di Bandung dari tahun 1929. Tahun 1931 menerbitkan *Al-Fatwa*, sebuah majalah berbahasa

⁸⁶ Deliar Noor, *Ibid*

Indonesia dan dicetak dengan huruf Jawi. Sebuah majalah lain *Al-Lisaan* kemudian diberhentikan ketika Jepang masuk di Indonesia. Majalah lain *Al-Takwa*, sebuah majalah dalam bahasa Sunda, Majalah *Soal Jawab* yang diterbitkan pada tahun 1930-an mengemukakan artikel-artikel dalam bentuk jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan oleh para pembacanya yang pada umumnya berkenaan dengan agama.⁸⁷

4.2. Hasil Penelitian dan penemuannya

Dalam uraian ini akan menganalisis orientasi politik masyarakat Jawa Barat dengan melihat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Uraian ini berguna untuk melihat pengaruh aliran politik yang berkembang di masyarakat serta untuk menggambarkan bagaimana budaya politik yang berkembang di masyarakat Jawa Barat. Bahasan ini akan menjelaskan setiap pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia mulai dari pemilu 1955 sampai dengan pemilu 2004 dengan menggambarkan perolehan suara di Provinsi Jawa Barat.

⁸⁷ *Ibid*

Pemilu Tahun 1955

Pemilu 1955 merupakan Pemilu pertama dalam era kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Burhanudin Harahap dari Partai Masyumi telah berjasa besar menyelenggarakan Pemilu ini dengan sukses. Pemilu tahun 1955 sering disebut sebagai pemilu yang demokratis karena diikuti oleh banyak partai politik baik partai politik yang beraliran agama, nasionalis maupun partai yang haluan kedaerahan. Pemilu 1955 juga membuka ruang bagi individu yang akan ikut berkompetisi dalam pemilu sebagai peserta pemilu perseorangan. Pemilu yang diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Jawa Barat melahirkan dinamika politik khas masing-masing daerah

Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduknya yang mayoritas beragama Islam, tidak terlalu mengherankan dalam segala aspek yang berkaitan dengan dinamika kehidupan politik Jawa Barat, aspek ke-Islaman, isme kedaerahan, wawasan kebangsaan, serta kebutuhan atas gagasan-gagasan pembaharu selalu tampak mencuat ke permukaan dan menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari dinamika perpolitikan di daerah ini.

Dalam Pemilu 1955⁸⁸ diikuti oleh Parpol dan Perorangan, peraih suara terbanyak di Jawa Barat adalah Masyumi yang berhasil mengumpulkan 26,5 %, disusul oleh PNI dengan persentase 22,1 %, PKI (10,9 %), NU (9,7 %), serta PSII dan Perti (masing-masing 5,7 %).

Jika dijumlahkan, persentase perolehan suara keseluruhan partai-partai Islam adalah 41,9 %. Walaupun angka ini belum dapat menempatkan partai-partai Islam tersebut sebagai peraih mayoritas, tetapi dengan melihat persentase yang cukup tinggi bahkan kurang lebih sama dengan persentase secara nasional, hal ini menunjukkan bahwa aspek ke-Islam-an merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan politik di Jawa Barat, khususnya pada masa itu.

Yang tampak cukup menarik untuk disimak adalah dengan keberhasilan PNI memperoleh terbanyak kedua setelah Masyumi dan selisih suara yang diraihnya tidak terlalu jauh. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada masa-masa itu di samping aspek-aspek ke-Islam-an,

⁸⁸ Data pemilu 1955 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Badan Arsip Nasional Jakarta.

wawasan nasionalisme juga cukup berpengaruh dalam percaturan politik di Jawa Barat.

Demikianlah gambaran secara umum dinamika politik Jawa Barat pada pasca Pemilu 1955. Dari hasil yang diraih dari masing-masing partai, terlihat bahwa Masyumi dan PNI merupakan kekuatan politik utama di Jawa Barat ketika itu. Bahkan jika dibandingkan dengan perolehan suara partai lainnya, kedua partai ini cukup dominan misalnya, walaupun secara nasional NU dan PKI menduduki urutan ketiga dan keempat dengan persentase perolehan suara masing-masing 18,4 dan 16,3%, namun di Jawa Barat keduanya dapat dikatakan tidak memiliki popularitas sebesar yang diraihnya secara nasional.

Pemilu Tahun 1971

Pemilu 1971 merupakan Pemilu pertama dalam Era Orde Baru, karenanya dibandingkan dengan Pemilu yang diselenggarakan tahun 1955 perbedaan amat mencolok terutama terlihat dari jumlah Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang hanya 10 partai tanpa diikuti oleh Masyumi, PSI dan PKI.

Masyumi dan PSI dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena banyak anggotanya yang terlibat dalam pemberontakan daerah (PRRI, PERMESTA), sedangkan PKI dibubarkan oleh Pengembalian Surat Perintah Sebelas Maret Presiden RI Soeharto karena pelaku makar G-30-S/PKI.

Hasil Pemilu secara bermutu adalah Sekber Golkar yang untuk daerah Jawa Barat mampu mengumpulkan 7.625.797 (76,12%) dari 10.017.708 suara sah yang masuk. Hal ini berarti Golkar sekaligus meraih suara mayoritas. Kemudian disusul oleh NU yang meraih 1.310.679 (13,08%). Parmusi (399.730/3,99%), PSII (304.989/3,04%) dan PNI (172.551/1,72%), sedangkan 5 partai lainnya, yaitu Perti, Perkindo, Partai Katholik, Murba, dan IPKI hanya mampu meraih suara masing-masing 55.315, 12.013, 40.679, 10.042 dan 69.913 suara, yang jika dijumlahkan suara yang diraih kelima partai itu dipersentasikan hanya 2,05%.⁸⁹

⁸⁹ Data pemilu 1971 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Badan Arsip Nasional Jakarta.

Barangkali dengan memperhatikan latar belakang Golkar tampil sebagai kekuatan baru tidak akan terlalu sulit untuk dipahami, apalagi organisasi politik ini sebagai eksponen sekaligus motor penggerak Orde Baru. Bagi Jawa Barat, latar belakang ini sangatlah penting mengingat peranannya dalam membina Orde Baru. Dengan tanpa bermaksud mengecilkan peranan yang dimainkan oleh OPP lain, bahwa Golkar Jawa Barat telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap proses kelahiran Orde Baru. Adalah fakta sejarah bahwa pada masa Orde Baru, gagasan pembaharuan dan pembangunan yang kemudian disuarakan Orde Baru sebagian besar dari hasil pemikiran tokoh-tokoh Golkar Jawa Barat.

Hal lain yang menjadi faktor utama kemenangan Golkar adalah berkat penampilan organisasi ini dalam mengemukakan gagasan. Kemudian hal lain yang mendorong kemenangan Golkar adalah faktor sosio politis yang selama itu, pemerintahan Parlementer yang didominasi parpol kurang memperhatikan kekaryannya sehingga berkenan di hati masyarakat.

Dalam Pemilu 1971, di samping tampilnya Golkar sebagai kekuatan baru, NU-pun berhasil memperbaiki

pamornya baik di antara sesama partai Islam maupun dalam perolehan suara secara keseluruhan. Di antara partai-partai Islam, NU berhasil menempati posisi teratas sedangkan dalam perolehan suara secara keseluruhan NU menduduki peringkat kedua setelah Golkar. Di samping itu, persentase perolehan suara NU juga meningkat jauh lebih besar dibandingkan Pemilu tahun 1955. Begitulah Pemilu 1971 meninggalkan banyak cacatan dan fenomena penting dalam konstalasi kehidupan politik di Jawa Barat.

Pemilu Tahun 1977

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya khususnya dalam jumlah OPP. Pemilu 1977⁹⁰ hanya diikuti oleh 3 OPP setelah terjadinya penyederhanaan Partai Politik yang terdiri dari Golongan Karya dan dua partai politik saja dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. dengan demikian, telah terjadi fusi sebagai berikut:

- a) Partai-partai Islam (NU, PSII, Perti dan Permusi) menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

⁹⁰ Data pemilu 1977 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat.

- b) Partai-partai PNI, IPKI, Murba, Perkindo, dan Partai Katholik menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
- c) Golongan Karya sendiri.

Adapun hasil Pemilu Tahun 1977 adalah: Golkar berada di posisi teratas dengan meraih 7.925.7289 (66,27%) dari 11.595.500 suara yang sah. PPP di urutan kedua dengan meraih 3.413.310 (28,54%) dan PDI menempati tempat ketiga dengan perolehan suara 620.462 (5,19%).

Dalam Pemilu kali ini, fenomena penting muncul adalah bangkitnya kekuatan Islam (melalui PPP). Sejalan dengan itu, perolehan suara Golkar tampak menurun. Sementara itu PDI juga, meskipun perolehan suara jauh di bawah perolehan suara PPP, tetapi angka 5,19 % yang diperolehnya memperlihatkan peningkatan yang cukup mengesankan, sebab dalam Pemilu 1971 perolehan total lima partai sebelum berfusi menjadi PDI hanya 3,22 % yang 1,72 % di antaranya diraih PNI.

Pemilu Tahun 1982

Dalam Pemilu tahun 1982⁹¹ diperoleh hasil suara masing-masing OPP sebagai berikut: Golkar berhasil meraih 8.596.458 suara (63,34%) dari 13.572.006 suara yang sah, disusul kemudian oleh PPP yang meraih 3.687.132 (27,16%) suara dan PDI meraih 1.288.416 (9,5%).

Fenomena yang muncul menjelang dilangsungkannya Pemilu Tahun 1982 adalah terjadinya kemelut intern yang mulai melanda PPP yang pada gilirannya menyebabkan terbengkalainya konsolidasi partai tersebut. Rupanya optimisme yang mulai tertanam sejak Pemilu 1977 sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Di sisi lain, PDI yang mencatat kemajuan yang cukup berarti dalam Pemilu 1977 ternyata mampu memelihara optimisme yang mulai muncul. Hasilnya sungguh menggembirakan, PDI mampu mengumpulkan perolehan suara yang cukup besar, yaitu 9,5 %. Sementara itu Golkar terus merosot dan PPP mulai menurun.

⁹¹ Data pemilu 1982 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemilu Tahun 1987

Dalam Pemilu 1987⁹² rekapitulasi perolehan suara di Jawa Barat untuk masing-masing OPP sebagai berikut: Golkar memperoleh 11.347.051 (71,3%) dari 15.911.962 suara yang sah, sekaligus semakin memperkokoh posisi pertama. Disusul kemudian oleh PDI yang memperoleh 2.376.065 (14,9% diposisi kedua, sedangkan PPP tergeser ke posisi ketiga dengan hanya memperoleh 2.197.846 (13,8%).

Dengan memperhatikan data di atas, terlihat bahwa PDI semakin mencuat ke permukaan dengan menggeser PPP dari posisi kedua dan ke posisi ketiga. Sukses PDI dalam Pemilu 1982 rupanya terus berlanjut dalam Pemilu 1987 ini. Partai ini kembali mencatat perolehan suara yang sangat menggembirakan, baik terlihat dari segi persentase maupun jumlah suara. Sebaliknya PPP sepertinya cenderung semakin melorot, Golkar yang banyak kehilangan suara dalam Pemilu 1977 dan 1982, sudah mulai banyak menarik pengalaman berharga dengan

⁹² Data pemilu 1987 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat.

berusaha keras memperbaiki penampilannya. Dengan perolehan suara 71,3 % berarti mengalami kenaikan 8 % dari hasil Pemilu sebelumnya. Golkar tampil sebagai pemenang berkat dukungan rakyat yang luas dari berbagai kalangan.

Walaupun dalam Pemilu 1987 di Jawa Barat ini PDI mampu mengungguli PPP, akan tetapi berarti PPP kalah oleh PDI di semua Daerah Tingkat II. Ternyata di beberapa kabupaten partisan PPP masih tetap menonjol. Misalnya di Kabupaten Serang, Pandeglang, Garut, dan Tasikmalaya.

Pemilu 1987 dilaksanakan secara lebih aman dan tertib dari sebelumnya karena sejak Pemilu 1987 ini ketiga OPP untuk pertama kalinya tampil dengan satu azas yang sama, yaitu Pancasila. Dalam Pemilu itu NU berdiam diri tidak melibatkan diri dalam kontes politik. Hal ini ada krusial dengan organisasi induknya PPP.

Pemilu Tahun 1992

Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1992.⁹³ Dalam Pemilu kali ini, Golkar Jawa Barat meraih 13.387.007 (70,49%) dari 18.993.272 (14,93%) dan PDI dengan 2.796.952 suara (14,58%) di urutan ketiga.

Dalam Pemilu kali ini PPP mulai bangkit kembali di Jawa Barat, walaupun hasil yang diraihnya tidak menyolok, tetapi cukup menggembirakan paling tidak PPP dapat meraih kembali kedudukannya di posisi kedua setelah sempat digeser PDI dalam Pemilu 1987. Memang selisih perolehan suara antara PPP dan PDI dalam Pemilu 1982 tidak jauh berbeda, tapi jelas PDI mengalami penurunan persentase perolehan suara yaitu dari 14,9% menjadi 14,58. Hal yang sama juga dialami oleh Golkar yang mengalami penurunan persentase dari 71,3% menjadi 70,49%.

Perlu digaribawahi bahwa keberhasilan PPP tersebut masih belum mampu menyamai hasil yang diraihnya dalam Pemilu 1977 dan 1982. Hal ini berarti

⁹³ Data pemilu 1992 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat.

bahwa meskipun PPP mampu menempati posisi kedua kembali, namun dapat dikatakan bahwa para penduduknya tetap belum kembali sepenuhnya atau mungkin tidak akan pernah kembali sama sekali. Sepertinya bukan hal yang mustahil jika kemerosotan yang terjadi hanya untuk sementara serta belum bisa dijadikan sebagai indikasi telah mulai berpalingnya para pendukung kedua organisasi tersebut.

Golkar sebagai sebuah organisasi kekuatan sosial politik terbesar tetap keluar sebagai pemenang dengan suara mutlak yang diperolehnya (di atas 70 %) untuk seluruh Jawa Barat. Keberhasilan Golkar sudah tentu terjadi juga di Daerah-daerah Tingkat II, sedangkan PPP dan PDI tampaknya mengalami fluktuasi.

Berdasarkan distribusi perolehan suara tersebut di atas dapat dilihat bahwa posisi Golkar di masing-masing Daerah Tingkat II bisa dikatakan stabil, kecuali di beberapa Daerah Tingkat II Serang, Pandeglang, Sukabumi, Garut, dan Tasikmalaya diketahui Daerah tersebut merupakan basis utama PPP, sedangkan yang termasuk basis PDI ialah Kotamadya Bandung, Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Cianjur.

Perlu pula digarisbawahi di sini bahwa berdasarkan kontelasi keberadaan PPP dan PDI di masing-masing Daerah Tingkat II di atas, baik dalam Pemilu 1987 maupun dalam Pemilu 1982, selisih perolehan suara antara keduanya di Jawa Barat secara keseluruhan tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya, ketika PDI mengalahkan PPP dalam Pemilu 1987, PDI hanya unggul 169.219 suara, sedangkan dalam Pemilu 1992 total suara yang diperoleh PPP hanya 66.291 lebih banyak dari PDI, sehingga dapat disimpulkan perimbangan kekuatan antara keduanya di Jawa Barat secara umum adalah sama.

Pemilu Tahun 1997

Pemilu 1997⁹⁴ merupakan pemilu yang berkaitan dengan awal dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia bahkan di Asia sebagai akibat dari perdagangan global. Kurs rupiah pada waktu itu sudah mencapai angka Rp 9.000,00 sehingga berdampak terhadap melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Di tengah krisis yang

⁹⁴ Data pemilu 1977 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

melanda Indonesia Golkar sebagai partai yang berkuasa pada waktu itu masih menjadi idola masyarakat dengan mendapatkan kemenangan dalam pemilu. Di Jawa Barat Golkar masih menjadi partai peraih suara mayoritas untuk tingkat nasional (DPR RI) Golkar mendapatkan 16.709.824 suara, disusul PPP yang mendapatkan suara 6.003.471 dan ketiga ditempati PDI yang meraih suara 387.938 suara. Adapun di tingkat provinsi (DPRD) Jawa Barat Golkar meraih 16.518.351 suara, PPP meraih 5.991.973 suara dan PDI meraih suara terendah yaitu 383.043 suara.

Naiknya suara PPP diuntungkan dengan adanya konflik yang terjadi di tubuh PDI. PDI yang berkongres tahun 1992 di Bali telah menjadikan Megawati sebagai ketua umum tetapi dengan berbagai dongkelan dari beberapa pihak yang ketakutan akan munculnya Megawati sebagai jelmaan dari rezim Soekarno yang kelak ada kemungkinan untuk bersaing dengan Presiden Soeharto dalam pencalonan Presiden tahun 1998 maka dilakukan kongres luar biasa di Medan. Megawati berhasil di jatuhkan pada kongres luar biasa PDI tahun 1994 di Medan dengan melahirkan Ketua Umum Soerjadi. Di

jatuhkannya Megawati sebagai ketua umum berdampak kepada dua kepemimpinan dalam tubuh PDI yaitu PDI Megawati dan PDI Soerjadi. Titik puncak dari konflik itu terjadi penyerangan sekretariat PDI di Jl Diponegoro oleh pihak Soerjadi yang mengakibatkan banyak korban dan orang hilang. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Juli 1994. Sampai sekarang peristiwa itu masih diperingati sebagai tragedi demokrasi oleh para pendukung Megawati dan LSM-LSM pro demokrasi.

Peristiwa itu berdampak kepada larinya para pendukung Megawati kepada partai lain. Partai yang dipilih oleh para pendukung Megawati adalah PPP. Golkar dianggap sebagai partai yang menjadi motor dan perekayasa dalam penjatuhan Megawati dari kursi ketua umum. Soerjadi dianggap oleh konstituen PDI sebagai ketua umum titipan pemerintah plus Golkar yang sasarannya untuk mengamankan kursi Presiden Soeharto yang akan dipilih lagi pada Sidang Umum MPR tahun 1998. Konflik itu memunculkan opini Mega Bintang yang merupakan perpaduan antara pendukung Megawati dengan PPP yang pada waktu itu berlambang Bintang. Isu itu ternyata sangat ampuh dan menjadikan naiknya suara

PPP baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan PDI yang dipimpin Soerjadi pada pemilu 1997 peraihan suaranya turun drastis.

Pemilu Tahun 1999

Pemilu 1999⁹⁵ merupakan pemilu yang prematur atau pemilu yang dipercepat karena seiring dengan krisis kepemimpinan pasca turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Krisis dalam segala aspek telah memaksa jatuhnya Presiden Soeharto dan munculnya tuntutan akan reformasi dalam segala bidang sehingga mulai saat itu disebut Orde Reformasi. Reformasi yang dilakukan antara lain adalah merubah undang-undang politik sehingga pada pemilu 1999 peserta pemilu diikuti oleh 48 partai.

Maraknya partai-partai politik mengakibatkan penyebaran suara tidak tertuju pada salah satu partai. Oleh karena itu parta-partai yang berdiri pada masa Orde Baru yaitu Golkar, PPP dan PDI terjadi penurunan yang cukup

⁹⁵ Data pemilu 1999 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

drastis tetapi eksistensi mereka tetap masih diunggulkan dalam perolehan suara kecuali PDI Soerjadi yang jatuh amblas tersedot suaranya oleh PDI Megawati yang merubah partai menjadi PDI Perjuangan (PDIP).

PDIP muncul sebagai pemenang dalam pemilu 1999 baik ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Di Jawa Barat PDIP meraih 5.397.235 suara atau 32,21% untuk tingkat DPR RI dan untuk DPRD I meraih 5.387.993 suara atau 32,20% dengan demikian PDIP berada pada urutan pertama disusul Partai Golkar pada urutan kedua dengan meraih 4.009.344 suara atau 23,93 % untuk DPR RI dan untuk DPRD I meraih 4.010.294 suara atau 23,97 %. Peraih suara ketiga PPP dengan meraih 2.581.929 suara atau 15,14% untuk DPR RI dan untuk DPRD I meraih 2.581.713 suara atau 15,43%.

Peraih suara keempat di Jawa Barat adalah PAN yang memperoleh 1.248.817 atau 7,45% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 1.220.622 atau 7,30%. Kelima adalah PKB dengan memperoleh 1.132.522 suara atau 6,76% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 1.138.538 suara atau 6,80%. Keenam yaitu PBB dengan perolehan 642.804 suara atau 3,81% untuk DPR RI dan

untuk DPRD I memperoleh 648.578 suara atau 3,88%. Ketujuh adalah Partai Keadilan (PK) yang memperoleh 444.810 suara atau 2,06% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 455.224 suara atau 2,42%. Kedelapan adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang memperoleh 182.045 suara atau 1,09% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 181.473 suara atau 1,08%. Partai-partai yang lainnya hanya memperoleh dibawah 1%.

Kemenangan PDIP pada pemilu 1999 di Jawa Barat dirasa wajar dengan beberapa alasan yaitu, *pertama*, Jawa Barat merupakan basis PNI yang pada waktu pemilu 1955 menduduki posisi kedua setelah Masyumi sebagaimana diuraikan di atas sehingga masih banyak yang simpatik terhadap PDIP sebagai kelanjutan dari PNI. *Kedua*, figur Megawati yang dianggap sebagai penjelmaan Bung Karno sehingga Bandung pada waktu itu menjadi lautan merah. *Ketiga*, muncul empati bahwa Megawati merupakan orang yang didhalimi oleh Orde Baru sehingga rasa iba itu melahirkan simpatik bagi masyarakat. *Keempat*, PDIP diopinikan sebagai partai orang kecil (*wong cilik*). Krisis berkepanjangan yang melahirkan tingkat kemiskinan

semakin meningkat sehingga muncul protes terhadap partai yang berkuasa pada waktu itu yaitu Golkar dengan mengalihkan suara pada PDIP yang teropiniakan akan membela rakyat kecil.

Sedangkan kekalahan Partai Golkar di Jawa Barat dapat dilihat dari beberapa alasan yaitu *pertama*, ada anggapan bahwa Golkar sebagai partai yang berkuasa harus bertanggung jawab atas krisis yang melanda Indonesia sehingga harga-harga bahan pokok melonjak naik yang berakibat tingginya angka kemiskinan. *Kedua*, Golkar tengah dihujat untuk dibubarkan oleh gerakan-gerakan pro-reformasi dan pro-demokrasi sebagai wujud dari pertanggung jawaban politik. *Ketiga*, Banyak tokoh-tokoh Golkar yang ditahan karena korupsi sehingga melahirkan opini negatif terhadap Golkar. *Keempat*, banyak tokoh-tokoh Golkar yang hengkang dari Golkar kemudian mendirikan partai baru atau bergabung dengan partai lain.

Apabila dilihat dari kaca mata politik aliran, realitas politik di Jawa Barat pada waktu itu dapat dikatakan aliran Islam masih tetap unggul di mana partai-partai Islam jika digabungkan berjumlah 38,30% yang terbagi kepada 17

partai Islam. Dengan demikian masyarakat Jawa Barat masih mengharapkan munculnya sosok partai Islam yang mampu menyatukan berbagai varian dan golongan dalam Islam itu sendiri sehingga terwujud dalam satu wadah perjuangan umat.

Pemilu Tahun 2004

Pemilu 2004⁹⁶ merupakan pemilu yang sangat demokratis sehingga dengan pemilu ini Indonesia mendapatkan beberapa penghargaan internasional atas terselenggaranya pemilu yang demokratis, aman dan tertib. Pemilu 2004 sebagai produk dari amandemen UUD 1945 yang dilanjutkan dengan perubahan Undang-undang politik sehingga peserta pemilu 2004 diikuti dari partai politik untuk memilih anggota DPR dan diikuti peserta perorangan untuk anggota DPD. Pemilu 2004 adalah pemilu untuk memilih dua lembaga legislatif.

Pemilu di Jawa Barat pada tahun 2004 diikuti 24 partai politik sebagaimana di provinsi lain. Sedangkan

⁹⁶ Data pemilu 2004 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

peserta pemilu perseorangan diikuti oleh 42 orang untuk memilih anggota DPD. Pemilihan anggota DPD dimenangkan oleh Ginandjar Kartasasmita pada urutan pertama disusul Pangeran Arief Natadiningrat pada urutan kedua. Ketiga adalah Mohammad Surya dan keempat Sofyan Yahya. Kemenangan keempat anggota DPD ini akan di bahas lebih lanjut dalam disertasi ini.

Pada pemilu 2004 terjadi perubahan suhu politik dengan kembalinya kemenangan bagi partai Golkar yang memperoleh 5.777.935 suara atau 27,90% sehingga menduduki urutan *pertama* disusul pada urutan *kedua* yaitu PDIP dengan meraih 3.640.703 suara atau 17,58%. Urutan *ketiga* diraih PKS yang merupakan pembaharuan dari Partai Keadilan (PK) pada pemilu 1999 dengan memperoleh 2.407.982 suara atau 11,63%. *Keempat* adalah PPP dengan memperoleh 2.186.373 suara atau 10,56%. *Kelima* yaitu Partai Demokrat dengan memperoleh 1.610.093 suara atau 7,78%. *Keenam* adalah PKB dengan memperoleh 1.080.554 suara atau 5,22%. *Ketujuh* adalah PAN dengan memperoleh 1.064.257 suara atau 5,14%. *Kedelapan* adalah PBB dengan memperoleh 612.735 suara atau 2,96%. *Kesembilan* yaitu PKPB yang

memperoleh 431.847 suara atau 2,09%. *Kesepuluh* adalah PBR dengan memperoleh 388.801 suara atau 1,88% dan *kesebelas* adalah PDS yang memperoleh 242.466 suara atau 1,17%. Sedangkan partai yang lainnya memperoleh suara di bawah 1%.

Pemilu 2004 menimbulkan kekagetan politik di mana banyak partai-partai baru dapat memperoleh suara yang cukup signifikan dengan menduduki posisi 5 besar seperti Partai Demokrat di urutan kelima dan PKS yang melejit mengalahkan partai-partai yang cukup mapan seperti PPP, PAN dan PKB yang sebelumnya berada lebih atas dari PK yang pada pemilu 2004 berubah menjadi PKS. PKS unggul dengan menduduki posisi ketiga. Sedangkan PBB jatuh drastis dengan menduduki urutan kedelapan. Jatuhnya suara PBB banyak dipengaruhi berbagai faktor antara lain *pertama*, konflik dalam tubuh PBB antara PBB Yusril Ihza Mahendra dengan PBB Hartono Marjono sehingga berdampak Hartono Marjono mendirikan partai baru walaupun tidak sempat mengikuti pemilu 2004 karena beliau meninggal dunia. *Kedua*, Dengan terjadinya konflik tersebut banyak tokoh PBB yang hengkang dari PBB dengan membentuk partai baru

atau bergabung dengan partai lain. *Ketiga*, PP Persis yang mencabut dukungan atas PBB dan menjadi ormas independen. Persis merupakan ormas Islam ketiga terbesar di Jawa Barat.

Fatwa PP Persis menjadi berkah terutama bagi PKS di mana jamaah Persis banyak menjadi tokoh PKS dan suara Persis jatuh ke PKS dan PPP yang berdampak naiknya suara PKS. Begitu pula dengan PPP terjadi penurunan karena terjadi konflik dalam partai sehingga banyak tokoh PPP yang mendirikan partai baru seperti Zainuddin MZ mendirikan PBR dan Saleh Cholid mendirikan PPP Reformasi.

Kemenangan Partai Golkar telah banyak diprediksi oleh berbagai kalangan dengan beberapa alasan yang antara lain *pertama*, berhasilnya Golkar mereformasi diri dengan memunculkan Golkar berparadigma baru. *Kedua*, Munculnya kekecewaan rakyat terhadap PDIP yang tidak lagi dianggap sebagai partai wong cilik. *Ketiga*, peralihan kekuasaan tidak melahirkan pembaharuan sehingga muncul kekecewaan kepada partai pemenang pemilu 1999 yaitu PDIP. Keempat, Golkar mampu menyolidkan kader-

kadernya sehingga terhindar dari perpecahan internal partai.

Realitas politik di Jawa Barat pada pemilu 2004 masih mencerminkan kuatnya pengaruh partai-partai yang berhaluan Islam. Apabila digabungkan dari ketujuh partai Islam peserta pemilu mendapat suara sekitar 38,03%. Dengan demikian politik Islam di Jawa Barat masih memiliki prospek yang unggul dengan melihat respon dari pemilih hanya terbentur oleh wadah partai yang berbeda-beda. Apabila ada partai Islam yang mampu menyatukan umat Islam besar kemungkinan partai Islam dapat unggul dari partai-partai lain. Dengan demikian Islam di Jawa Barat masih menjadi sebuah kekuatan politik yang harus diperhitungkan.

Dengan menganalisis dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa realitas politik di Jawa Barat masih menunjukkan dominasi Islam sebagai kekuatan politik pertama kemudian kedua adalah partai nasionalis dan yang ketiga adalah partai sosialis atau yang berorientasi ekonomi. Fenomena itu menunjukkan kuatnya Islam di Jawa Barat kecuali pada masa Orde Baru karena pada masa itu terjadi refresi politik sehingga banyak tokoh

Islam yang bergabung dalam Partai Golkar bahkan dapat dikatakan bahwa kemenangan partai Golkar di Jawa Barat adalah karena banyaknya merekrut tokoh-tokoh Islam di samping keberpihakan birokrasi dan ABRI. Sedangkan kemenangan PDIP pada pemilu 1999 lebih diuntungkan dengan terlalu banyaknya partai Islam dan sebagai wujud dari kekecewaan rakyat pada pemerintah pada masa itu.

BAB V

KESIMPULAN

Gerakan politik Islam di Jawa Barat berjalan seiring dengan pembaharuan keagamaan atau kesadaran keagamaan masyarakat Jawa Barat yang ditandai dengan munculnya kedua organisasi Islam dan kemunculannya disambut baik oleh masyarakat. Gerakan politik masyarakat Jawa Barat dengan melalui institusi organisasi masyarakat menggunakan pendekatan persuasif yakni dengan memasuki institusi-institusi politik yang terbangun oleh pemerintah kolonial pada masa itu, sehingga tokoh-tokoh politiknya memiliki pengalaman institusionalisasi politik.

Sedangkan gerakan politik Islam radikal muncul bukan merupakan pola dasar karakter gerakan politik masyarakat Jawa Barat, tetapi lebih disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pertama, kondisi politik nasional atau semacam bentuk kekecewaan atas realitas politik nasional awal kemerdekaan yang senantiasa merugikan Indonesia dalam setiap perjanjian dengan kolonial baik perjanjian Linggarjati maupun Renvill.

Kedua, kuatnya konflik ideologis baik secara nasional maupun konfirasi internasional meliputi; Islam, Komunis dan Sosialisme-Liberalisme. Ketiga, konflik internal dalam tubuh TNI antara TNI tehnokrat dengan mantan-mantan laskar perjuangan. Keempat, kekecewaan atas dominasi kelompok nasionalis sekuler dalam pemerintahan RI. Kelima, DI/TII dijadikan benteng perlawanan terhadap kolonial pasca hijarah TNI ke Yogyakarta.

Dengan demikian corak gerakan politik dan pemahaman Islam masyarakat Jawa Barat lebih bersifat moderat dan egaliter. Selian itu berjalan seiring kedadaran politik dengan kesadaran akan pembaharuan keagamaan Islam. Sehingga pembaharuan pemikiran Islam berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran berpolitik. Akan tetapi dukungan politik pada setiap pemilu terhaap partai-partai Islam terus menurun hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain: *Pertama*, parta-partai Islam terpecah menjadi beberapa partai, sehingga perhatian umat Islam Jawa Barat menjadi terpecahpula yang mengakibatkan dukungan menjai kecil karena terbagi-bagi. *Kedua*, Dominasi Orde Baru selama

32 tahun menyebabkan menurunnya ikatan ideologis politik Islam terhadap partai Islam, sehingga partai panangan umat lebih terbuka. *Ketiga*, Partai-Partai Islamterlalu lebih mengedepankan dominasi ormas Islam, sehingga hal-hal yang furiyah menjadi penyekat simpatiknya dukungan paa partai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, *The Political Behavioral of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989.
- _____, dan Nazaruddin Sjamsuddin, (eds), *Propil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Grafitti Press, 1991
- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Benda, Harry J, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Boland, B.J, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1985.
- Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991
- Bulkin, Farchan, *Pengantar Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Crouch, Harold, *Militer dan Politik*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- Ecomora, J. Eliseo, *Nasionalisme Mencari Ideologi*, Jakarta: Grafiti, 1991.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* Cet. III, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.

- Greesntein, Fred dan Nelson Polsby (eds), *Handbokk of Political Science*, Vol 3. Reading Mass, Addison-Wesley, 1977.
- Hiroko Horikoshi, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, Jakarta: P3M, 1987
- Ingleson, John, *Jalan ke Pengasingan*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Jackson, Karl D. *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan, Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Grafiti, 1990.
- Karim, M. Rusli, *Perjalanan Partai Politik, Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Keller, Suzanne, *Pemberontakan Petani Banten 1988*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Koever, A.P.E, *Sarekat Islam, gerakan Ratu Adil?*, Jakarta: Graffiti Pers, 1985.
- Kurasawa, Aiko, *Mobilisasi Dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, alih bahasa Hermawan Sulisty, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993
- Noer, Deliar, *Partai-Partai Islam Di Pentas Nasional*, Jakarta” Grafiti Pers, 1987
- _____, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980

Pasang Surut Partai-Partai Islam di Jawa Barat pada Pemilu 1955-2004

Corak gerakan politik dan pemahaman Islam masyarakat Jawa Barat lebih bersifat moderat dan egaliter. Akan tetapi dukungan politik pada setiap pemilu terhadap partai-partai Islam terus menurun, hal tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain: Pertama, Partai Islam selalu terpecah. Kedua, dominasi orde baru dan Ketiga, Partai Islam lebih mengedepankan ormas Islam.